



PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES



**DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KAB. BREBES**



(028) 871371 - 671156



dinarpus.brebes@yahoo.com



Jl. Raya Gor No.2 Gandasuli - Brebes

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025 telah berhasil disusun. Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini menjadi bukti konkret komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Sepanjang tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah berupaya maksimal dalam mengoptimalkan layanan literasi dan tertib kearsipan. Kinerja organisasi diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan tingkat keberhasilan sasaran strategis. Meski dihadapkan pada tantangan penetapan target yang dinamis, kami tetap berhasil mencatat pertumbuhan substansial, terutama dalam hal kepuasan masyarakat dan integrasi kearsipan digital. Selain itu, prestasi yang diraih di tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Laporan ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi yang objektif guna mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan. Hasil analisis dalam laporan ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas seluruh aparatur di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang diraih tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga LKIP Tahun 2025 ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi pemacu semangat untuk terus memajukan Kabupaten Brebes.

Brebes, 25 Februari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



NURJANTO, S.Rd.SD
Pembina Tingkat I
NIP. 197012311988031033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah

b. Tugas Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinarpus; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b) Merumuskan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan sebagai

- dasar pelaksanaan kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi kebijakan di Kearsipan dan Perpustakaan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
 - d) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - e) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Kearsipan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
 - f) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Perpustakaan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
 - g) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
 - h) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - i) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - j) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k) Melaksanakan monev dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung PNS sejumlah 16 orang, PPPK sejumlah 6 orang, dan PPPK Paruh Waktu sejumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

Golongan	IV	:	4	orang
Golongan	III	:	10	orang
Golongan	II	:	2	orang
Golongan	I	:	0	orang
PPPK		:	6	orang
PPPK Paruh Waktu		:	8	orang

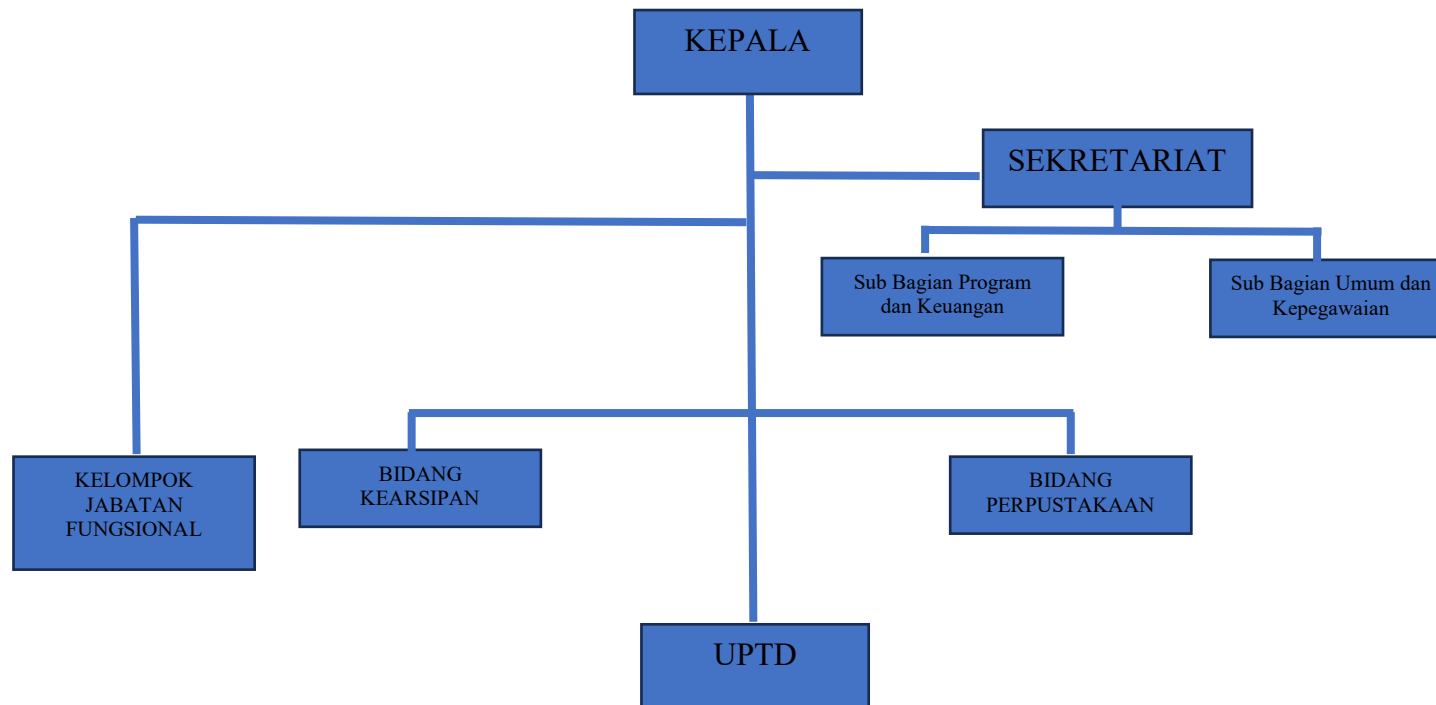
Dilihat dari Tingkat Pendidikannya ASN Dinarpus, terdiri dari

SD	:	-	orang
SMP/SLTP	:	-	orang
SLTA	:	3	orang
Sarjana Muda	:		orang
Sarjana	:	8	orang
Pasca Sarjana	:	5	orang

Selain pegawai PNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dibantu oleh pegawai non PNS sebanyak 5 orang terdiri dari Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris
 - Kasubbag Program dan Keuangan;
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Kearsipan;
- d. Kepala Bidang Perpustakaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sumber: Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

a. Gedung

Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terbagi menjadi tiga gedung:

1. Gedung Perpustakaan Daerah beralamat di Jalan Raya Gor No 2 Gandasuli Brebes berfungsi sebagai Layanan Perpustakaan Daerah/Umum dan digunakan sebagai Sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan;
2. Gedung Depo Arsip beralamat di Jl. Puspongoro 3A Kabupaten Brebes sebagai tempat penyimpanan arsip (depo) arsip statis dan arsip inaktif Pemerintah Kabupaten Brebes.

b. Kendaraan Operasional

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memiliki kendaraan dinas operasional berupa 6 (enam) kendaraan roda empat terdiri dari 1 (tiga) mobil jabatan, 2 (dua) mobil operasional, 3 mobil perpustakaan keliling, 6 (enam) kendaraan roda dua dan 1 (satu) kendaraan perpustakaan keliling roda dua.

B. Fungsi Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan

Secara strategis, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan budaya baca dan tata kelola administrasi informasi. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini bertanggung jawab penuh atas optimalisasi pengolahan arsip agar lebih berdaya guna, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di bidangnya. Selain itu, fokus utama juga diarahkan pada penyelamatan dokumen daerah dan transformasi perpustakaan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang inklusif serta mudah diakses oleh seluruh warga Brebes. Dalam hal akuntabilitas penggunaan sumber daya, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki mandat utama sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Tata Kelola Arsip:** Memperbaiki sistem pengolahan dokumen demi terciptanya tertib administrasi yang efisien dan mudah diakses.
2. **Pengembangan Kompetensi SDM:** Meningkatkan kapabilitas dan jumlah tenaga ahli di bidang kearsipan maupun perpustakaan.
3. **Preservasi dan Publikasi Arsip:** Menjamin keamanan dokumen negara melalui langkah penyelamatan, perawatan, serta sosialisasi fungsi arsip kepada publik.
4. **Transformasi Perpustakaan:** Membangun perpustakaan sebagai pusat literasi, iptek, dan budaya guna menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat.
5. **Pemerataan Akses Informasi:** Memperluas cakupan layanan perpustakaan agar dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat secara inklusif.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dihadapkan kepada beberapa kendala permasalahan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan sarana temu kembali arsip statis. Berdasarkan Hasil Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) tahun 2024 untuk pengelolaan arsip statis masih di level 2 (maksimal level 4)
2. Pelaksanaan restorasi dan preservasi arsip belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan Hasil Audit Sistem Kearsipan Eksternal tahun 2024 untuk Pelaksanaan restorasi dan preservasi arsip masih di level 1 (paling rendah).
3. Pelaksanaan Penyusutan arsip pada perangkat daerah belum optimal. Berdasarkan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal

- (ASKI) Perangkat Daerah tahun 2024 baru 30% Perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip.
4. Implementasi Srikandi dan digitalisasi arsip pada perangkat daerah belum optimal. Data Berdasarkan Dashboard SPBE dari ANRI, pemberkasan arsip baru 10% dari penciptaan arsip (arsip keluar dan masuk).
 5. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kearsipan yang belum memadai. Berdasarkan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Perangkat Daerah tahun 2024 baru 60% Perangkat daerah menyediakan ruang penyimpanan arsip dan SDM Kearsipan (Arsiparis) pada perangkat daerah bukan dari latar belakang pendidikan kearsipan
 6. Terbatasnya jumlah koleksi perpustakaan yang masih jauh dari standar (sesuai standar perpustakaan daerah dengan jumlah penduduk diatas 2.000.000 jiwa sebanyak 45.000 judul sedangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah baru 19.311 judul – data sampai tahun 2024).
 7. Masih rendahnya perpustakaan yang sudah sesuai standar nasional perpustakaan/ terakreditasi (baru 35 perpustakaan sekolah dari 512 jumlah perpustakaan sekolah – 6,84%).
 8. Masih rendahnya persebaran perpustakaan di seluruh desa di Kabupaten Brebes (dari 279 desa/ kelurahan baru 78 desa/ kelurahan yang memiliki nomor pokok perpustakaan).
 9. Keterbatasan sumberdaya manusia di perpustakaan pembina di daerah (hanya ada 6 pustakawan untuk membina 745 perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan perpustakaan kabupaten)
 10. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan minat baca masyarakat (baru 3,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Brebes)

11. Minat baca masyarakat masih rendah (Nilai TGM baru 68,80 jauh dibawah rata- rata Provinsi Jawa Tengah 73,91)
12. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (i-Brebes, otomasi layanan).

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memegang tanggung jawab atas urusan wajib di sektor kearsipan dan perpustakaan. Instansi ini berkewajiban melaporkan akuntabilitas kinerjanya di setiap akhir tahun anggaran, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Seluruh pelaksanaan program tersebut berpijak pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, serta strategi kebijakan. Selain itu, RENSTRA ini juga menetapkan sasaran pembangunan sebagai indikator nyata keberhasilan kinerja organisasi.

1. Visi

Visi rencana pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 disusun dengan mendasarkan pada visi Rencana Pembangunan Daerah. Visi rencana pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 adalah:

“BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam empat tahun kedepan.

2. Misi

Misi merupakan representasi langkah strategis yang ditempuh guna memastikan visi dapat terealisasi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes 2023-2026, terdapat enam pilar misi utama, yaitu :

- 1) Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia

- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif
- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
- 5) Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah
- 6) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan pembagian tersebut, peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara spesifik beririsan dengan **misi kedua**, yakni **meningkatkan kualitas sumber daya manusia**, khususnya pada sasaran ketiga.

3. Tujuan

Dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai fondasi pengukuran kinerja. Penetapan tujuan organisasi dilakukan dengan menginkorporasikan substansi misi daerah serta mempertimbangkan analisis isu strategis dan dinamika lingkungan organisasi. Tujuan ini berfungsi sebagai parameter utama dalam mengarahkan setiap tahapan perencanaan pembangunan di lingkungan dinas.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam bentuk Sasaran, yang merupakan target capaian kinerja yang lebih spesifik, kuantitatif, dan terukur. Sasaran ini disusun secara periodik dan berkesinambungan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Brebes adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif.
- 2) Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan Terintegrasi.
- 4) Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi.
- 5) Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai diukur, menantang, namun dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menetapkan sasarannya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.
- 2) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip.
- 4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- 5) Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat

Tabel Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Elemen Perencanaan	Penjabaran Strategis
Misi RPD (Kabupaten)	Misi 2: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Brebes.
Tujuan	1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif. 2) Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan. 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan Terintegrasi. 4) Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi. 5) Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas.
Sasaran Strategis	1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah. 2) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat. 3) Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip. 4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 5) Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes 2.) Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan 3.) Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kearsipan 4.) Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 5.) Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat

5. Strategi

Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan kearsipan menuju tertib arsip di Kabupaten Brebes
- b. Meningkatkan akses layanan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui layanan kearsipan.
- c. Meningkatkan akses layanan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui perpustakaan
- d. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta
- e. Penetapan peraturan penyelenggaraan kearsipan statis dan dinamis tingkat kabupaten.
- f. Penetapan peraturan penyelenggaraan sistem kearsipan dan jaringan kearsipan tingkat kabupaten.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
- i. Meningkatkan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka sesuai kebutuhan pengguna.

6. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen pengendali berupa ketentuan atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai acuan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin sinergi dan efektivitas dalam upaya merealisasikan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Dalam mendukung pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada poin-poin berikut:

- a. Mengoptimalkan peran pemerintah, lembaga publik, serta partisipasi masyarakat dalam penguatan ekosistem kearsipan dan perpustakaan daerah.
- b. Mengakselerasi kompetensi dan profesionalisme tenaga kearsipan (arsiparis) dan perpustakaan (pustakawan) secara berkelanjutan.
- c. Melakukan pemenuhan serta peningkatan standar sarana dan prasarana pendukung layanan kearsipan dan perpustakaan.
- d. Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib serta mendorong pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai motor pemberdayaan masyarakat.
- e. Memperkuat manajemen pengelolaan data melalui sistem digitalisasi untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
- f. Meningkatkan kualitas serta kuantitas koleksi bahan pustaka yang relevan dengan perkembangan iptek, guna memenuhi kebutuhan literasi pengguna di era digital.

7. Program

Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes Tahun 2025, sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.;
- Program Pembinaan Perpustakaan;
- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
- Program Pengelolaan Arsip;
- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan komitmen dari pimpinan instansi yang merepresentasikan tekad untuk mewujudkan target kinerja yang spesifik, jelas, dan terukur dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi instrumen akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien.

. Guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menjabarkannya ke dalam berbagai program dan kegiatan. Untuk Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut didistribusikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

➤ **Program Pembinaan Perpustakaan.**

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

➤ **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**

Kegiatan:

1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota.

➤ **Program Pengelolaan Arsip.**

Kegiatan:

1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;

2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota;

3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

➤ **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**

Kegiatan:

1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 2025 dan Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain:

1. Menjadi manifestasi nyata atas kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta performa aparatur di lingkungan dinas;
2. Menyediakan indikator dan tolok ukur kinerja yang objektif sebagai landasan utama dalam melakukan evaluasi capaian kinerja berkala;
3. Menjadi instrumen penilaian atas keberhasilan atau hambatan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran instansi, sekaligus menjadi basis pemberian *reward* (penghargaan) maupun *punishment* (sanksi);

4. Memberikan basis data bagi pimpinan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, serta supervisi secara kontinu terhadap progres kinerja yang telah dicapai;
5. Menjadi acuan dasar dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga terdapat keselarasan (*alignment*) antara kinerja individu dengan target organisasi.

Sebagai upaya konkret dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian hasil (*result-oriented government*), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama Bupati Brebes (sesuai lampiran laporan ini).

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen strategis untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah disepakati, sebagaimana rincian target dan indikator yang tertuang dalam lampiran perjanjian ini. Melalui komitmen ini, Dinas kearsipan dan Perpustakaan memastikan bahwa seluruh penggunaan sumber daya akan difokuskan sepenuhnya pada pencapaian sasaran pembangunan daerah di sektor kearsipan dan perpustakaan.

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dapat berjalan optimal guna mencapai target kinerja tahun 2025, dukungan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes. Landasan operasional keuangan ini merujuk pada **Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025** tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang kemudian dirinci secara teknis dalam **Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2025** tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6.590.262.890,00 (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Alokasi dana tersebut didistribusikan secara proporsional ke dalam 5 (lima) program utama sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.039.940.890,-	PAD/DAU
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 750.000.000,-	DAK
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 582.000.000,-	DAU
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp 18.000.000,-	DAU
5	Program Pengelolaan Arsip.	Rp 183.532.200,-	PAD
6	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp 16.789.800,-	PAD
	JUMLAH	Rp 6.590.262.890,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. Akuntabilitas Kinerja

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Hasil pengukuran kinerja untuk Sasaran 1 disajikan secara mendetail pada Tabel 3.1 guna memberikan gambaran pencapaian yang telah diraih.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah								
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Capaian Tahun Sebelumnya			Target Akhir Renstra
					2024	2023	2022	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes (indeks)	82,46	83,24	100,95	82,66	82,58	80,78	82,46

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan standar layanan yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan akses terhadap informasi dan literasi dapat berjalan secara efektif dan inklusif.

Angka capaian indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes (indeks) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 82,46, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 83,24. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100,95%, yang dikategorikan dalam tingkat

capaian yang sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi yang telah direncanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten secara berkelanjutan. Pada tahun 2022, realisasi tercatat sebesar 80,78, kemudian meningkat menjadi 82,58 pada tahun 2023, dan terus naik menjadi 82,66 pada tahun 2024. Kenaikan ke angka 83,24 pada tahun 2025 mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dalam melakukan perbaikan kualitas layanan dari tahun ke tahun.

Dalam konteks pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Target Akhir Renstra ditetapkan sebesar 82,46. Dengan realisasi tahun 2025 yang telah menyentuh angka 83,24, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah berhasil melampaui target jangka menengah lebih awal dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang dijalankan berada pada jalur yang tepat (*on the track*) untuk mewujudkan sasaran strategis jangka panjang.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100,95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil.

Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 83,24. Nilai SKM diperoleh berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara mandiri pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes terhadap 461 responden dari berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan elektronik yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. kesembilan unsur itu meliputi :

1. Persyaratan;
2. System, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui :

Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur

UNSUR PENGUKURAN	IKM PER UNSUR
Persyaratan	82,29
Prosedur	83,37
Waktu	82,86
Biaya	84,78
Produk	84,11
Kompetensi	82,16
Perilaku	84,47
Aduan	84,49
Sarpras	80,59
Rerata IKM Per Unsur	83,24
IKM Unit Layanan	B
Mutu Unit Layanan	Baik

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan Biaya dan Aduan merupakan 2 (dua) isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarpas mendapatkan nilai terendah yaitu 80,59, Selanjutnya Kompetensi yang mendapatkan nilai 82,16 adalah nilai terendah kedua.

Fokus utama kami adalah melakukan perbaikan layanan dengan sarpras yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna.

Indikator Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bersifat spesifik terhadap unit layanan di Kabupaten Brebes. Saat ini, tidak terdapat data capaian pada level Provinsi maupun Nasional yang dapat digunakan sebagai pembanding langsung (*benchmark*) untuk indikator ini.

Dari perspektif efisiensi sumber daya, anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini berasal dari Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.039.940.89 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.172.099.644 atau 82,78% dengan capaian indikator terealisasi 83,24 dari target 82,46 sehingga tercapai 100,95% atau melampaui target sebesar 0.95%. Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Indikator	CK Capaian Kinerja 2025	PAK Pagu Anggaran 2025	RAK Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kearsioan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes	100,95%	5.039.940.890	4.172.099.644	82,78%	915.720.684	5.087.820.328	18,00%

Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk layanan kepuasan masyarakat mencapai 18,00%. Hal ini

menunjukkan bahwa Dinarpus Brebes mampu memberikan layanan publik dengan kualitas melampaui target meskipun menggunakan anggaran yang lebih hemat dari pagu yang disediakan.

Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain optimalisasi penyediaan layanan perpustakaan yang lebih modern, kemudahan akses terhadap arsip daerah, serta peningkatan kompetensi petugas layanan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Analisis efisiensi sumber daya menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sebesar 100,95% berhasil diraih melalui pemanfaatan anggaran yang terukur, sehingga menghasilkan keluaran yang melampaui target target fisik yang ditentukan.

Pencapaian Indikator Sasaran ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan strategis, di antaranya:

- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang mendukung kenyamanan pengunjung.
- Digitalisasi sistem informasi kearsipan dan perpustakaan untuk mempercepat proses pelayanan.
- Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara periodik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan secara cepat.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat.

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 2 telah dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat								
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Capaian Tahun Sebelumnya			Target Akhir Renstra
					2024	2023	2022	
1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (%)	45	11,27	25,04	30,34	219,02	279,9	55

Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat merujuk pada upaya organisasi dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Brebes. Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan mengukur laju pertumbuhan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan (baik fisik maupun digital melalui aplikasi iBrebes dan Perpustakaan Keliling) dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, target ditetapkan sebesar 45,00% dengan realisasi sebesar 11,27%. Secara administratif, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 25,04%. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal target belum terpenuhi karena penetapan angka dalam dokumen perencanaan yang terlalu agresif.

Analisis Tren dan Substansi Kinerja Meskipun secara angka persentase menunjukkan penurunan laju dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun secara substansi jumlah pengunjung riil menunjukkan tren positif yang konsisten:

- Tahun 2023: Jumlah pengunjung sebanyak 51.675 orang terjadi lonjakan signifikan pasca pembangunan gedung baru.
- Tahun 2024: Meningkat menjadi 67.352 orang (naik 15.677 orang atau 30,34% dari tahun sebelumnya) keberhasilan peningkatan jumlah pengunjung karena adanya berbagai event besar.

- Tahun 2025: Kembali meningkat menjadi 74.940 orang (naik 11,27% dari tahun 2024).

Pertumbuhan yang terus terjaga di atas angka 70.000 pengunjung per tahun membuktikan bahwa layanan tetap diminati oleh masyarakat. Lonjakan ekstrem pada tahun 2022 (279,9%) sebelumnya terjadi akibat adanya daya tarik Gedung Baru perpustakaan, sementara angka tahun 2025 merupakan bentuk normalisasi pertumbuhan yang lebih stabil.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2025

No	Jenis Anggota	Tahun 2025
1	Perpusda	64.920
2	Pusling	7994
3	Ebook	744
4	Pocadi	725
5	Lapas	557
	Jumlah Total	74.940

Analisis penyebab dan faktor lapangan penyebab utama ketidaktercapaian target adalah kekeliruan atau kesalahan persepsi saat penentuan target indikator Sasaran Renstra, di mana angka 45% tidak didasarkan pada tren pertumbuhan tahunan, tetapi dari angka pertumbuhan dari database Tahun 2022. Namun, dari sisi operasional, keberhasilan mempertahankan pertumbuhan didorong oleh optimalisasi Perpustakaan Keliling ke desa-desa terpencil dan penguatan kegiatan literasi di sekolah-sekolah.

Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan merupakan data yang bersifat internal dan spesifik pada masing-masing perpustakaan daerah. Hingga saat ini, tidak tersedia data pembandingan resmi untuk capaian tingkat Provinsi maupun Nasional terkait persentase peningkatan pengunjung tahunan. Hasil ini murni merefleksikan efektivitas program promosi, layanan, dan daya tarik fasilitas perpustakaan di tingkat lokal dalam menarik minat masyarakat secara faktual. Ketiadaan data

pembandingan eksternal ini menjadikan angka capaian daerah sebagai indikator utama untuk pemetaan mandiri dalam menentukan arah kebijakan literasi di masa mendatang.

Efisiensi Sumber Daya dari sisi anggaran, indikator ini didukung Program Program Pembinaan Perpustakaan dengan Pagu sebesar Rp1.332.000.000 dan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan Pagu sebesar Rp18.000.000 dengan realisasi 2 Program tersebut sebesar Rp1.314.885.029,00 (97,40%). Tingginya penyerapan anggaran yang tidak linear dengan capaian persentase target fisik (karena kesalahan penetapan target awal). Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK : Pagu anggaran keluaran i

RAK : Realisasi anggaran keluaran i

CK : Capaian keluaran i

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	25,04%	1.350.000.000	1.314.885.029	97,40%	(976.845.029)	338.040.000	-288,97%

Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk menyinkronkan target fisik dan anggaran di masa depan.

Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut

1. Revisi Target: Melakukan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan agar lebih realistis sesuai tren pertumbuhan riil.
2. Inovasi Layanan: Memperkuat layanan digital dan frekuensi *event* literasi untuk mencegah kejenuhan pengunjung.

3. Ekspansi Jangkauan: Menambah titik layanan Perpustakaan Keliling sebagai motor penggerak utama kunjungan fisik.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip							
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Capaian Tahun Sebelumnya		Target Akhir Renstra
					2024	2023	
1	Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kearsipan (%)	35	94	268,57 %	90	52	50

Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip

merujuk pada upaya transformasi tata kelola dokumen pemerintahan dari sistem manual menuju sistem informasi yang terintegrasi. Fokus utama sasaran ini adalah memastikan seluruh instansi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Brebes menggunakan sistem informasi kearsipan yang seragam guna mewujudkan tertib administrasi, keamanan data, dan kemudahan akses informasi birokrasi.

Indikator Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kearsipan (%) mengukur sejauh mana sistem informasi kearsipan telah diadopsi secara luas. Berdasarkan data pengukuran tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 35,00%, namun realisasi yang berhasil dicapai melampaui ekspektasi, yakni sebesar 94,00%. Integrasi ini telah tercapai pada 47 dari 50 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Brebes. Data ini diambil dari hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa

Tengah dan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal RSUD dan Kecamatan se Kabupaten Brebes tahun 2025 dengan nilai Baik ke atas (data terlampir).

Analisis Tren dan Perbandingan Kinerja Tren pencapaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir:

- Tahun 2023: Realisasi sebesar 52,00%.
- Tahun 2024: Meningkatkan menjadi 90,00%.
- Tahun 2025: Mencapai 94,00%.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Target Akhir Renstra ditetapkan sebesar 50,00%. Dengan realisasi tahun 2025 yang telah mencapai 94,00%, organisasi telah jauh melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini membuktikan bahwa percepatan digitalisasi kearsipan berjalan sangat efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari mayoritas perangkat daerah.

Analisis Keberhasilan dan Faktor Lapangan Keberhasilan yang melampaui target ini dipicu oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah terhadap digitalisasi birokrasi.
2. Intensitas bimbingan teknis penggunaan sistem informasi kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada arsiparis/pengelola arsip di setiap perangkat daerah.
3. Kesadaran perangkat daerah akan pentingnya integrasi data untuk mempercepat alur kerja administratif.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan merupakan indikator yang bersifat internal-administratif. Sampai saat ini, tidak terdapat data pembandingan resmi (benchmark) pada tingkat Provinsi maupun Nasional terkait persentase integrasi perangkat daerah terhadap sistem kearsipan terintegrasi. Hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki tahapan implementasi sistem informasi dan jumlah perangkat daerah yang berbeda-beda.

Efisiensi Sumber Daya Berdasarkan data anggaran, indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Arsip dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 183.532.200 dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan Pagu Anggaran Rp 16.789.800 dengan realisasi anggaran 2 Program tersebut mencapai Rp197.118.325 (98,40%). Dengan capaian kinerja fisik yang melonjak hingga 268,57% (berdasarkan rasio perbandingan target awal). Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kearsipan (%)	268,57%	200.322.000	197.118.325	98,40%	340.889.332	538.007.657	63,36%

tingkat efisiensi penggunaan anggaran tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar 63,36%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan alokasi biaya yang relatif efisien, organisasi mampu memberikan dampak cakupan integrasi yang sangat luas.

Analisis program penunjang dan solusi ke depan pencapaian ini didukung oleh kegiatan pembinaan kearsipan serta pemeliharaan sistem informasi yang dilakukan secara berkala. Sebagai langkah tindak lanjut untuk menyempurnakan capaian ini, organisasi akan fokus pada:

- Melakukan integrasi sisa 3 perangkat daerah yang belum terhubung sepenuhnya.

- Meningkatkan kapasitas *server* dan keamanan data sistem informasi kearsipan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna.
- Melakukan pemutakhiran data secara *real-time* untuk memastikan tertib arsip yang berkelanjutan.

d. Sasaran Strategis 4 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 4 telah dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4

Sasaran Srategis 4 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat									
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian Provinsi	Target Akhir Renstra
					2024	2023	2022		
1	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	11,50	13,57	118%	14,46	13,13	13,72	38,86	11,00

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator makro yang mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui ketersediaan sarana perpustakaan, koleksi buku, tenaga perpustakaan, dan tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Peningkatan IPLM bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang literat, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi melalui akses informasi yang berkualitas.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk nilai IPLM adalah 11,50. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 13,57, atau setara dengan 118% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) yang berada di angka 11,00, maka capaian saat ini telah melampaui target jangka panjang tersebut.

Pengukuran IPLM tahun ini menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada :

- dimensi kinerja sebesar 70 persen
- dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

**INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025**

NO	DIMENSI	NILAI
1	Kepatuhan	0,177
1.1	Variabel Koleksi	0,11
1.2	Variabel Tenaga Perpustakaan	0,243
2	Kinerja	0,118
2.1	Variabel Pelayanan	0,115
2.2	Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan	0,12
	Nilai IPLM	13,57

-

Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Pergeseran beban penilaian ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian (anomali) jika membandingkan secara langsung angka realisasi tahun 2025 (13,57) dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2024 (14,46), 2023 (13,13), dan 2022 (13,72).

Meskipun secara angka nominal terlihat fluktuatif dibandingkan tahun 2024, hasil pengukuran tahun 2025 tidak menunjukkan adanya penurunan atau kenaikan kinerja secara linier. Sebaliknya, angka 13,57 tersebut merupakan nilai basis baru (baseline) dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif. Penilaian saat ini lebih mencerminkan kualitas kinerja perpustakaan.

Bila disandingkan dengan Capaian Provinsi yang berada pada angka 38,86, terdapat selisih yang cukup signifikan antara capaian lokal (13,57) dengan rata-rata provinsi (38,86). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target internal (11,50) telah terlampaui sebesar 118%, standar literasi di tingkat provinsi bergerak jauh lebih progresif. Angka 38,86 di tingkat provinsi menjadi indikator bahwa potensi pengembangan literasi melalui dimensi kinerja (70%) masih sangat terbuka lebar. Daerah perlu melakukan akselerasi pada aspek pemanfaatan perpustakaan dan kualitas koleksi untuk mengejar ketertinggalan dari standar provinsi. Mengingat penggunaan instrumen terbaru (Perka Perpustnas No. 7 Tahun 2025), capaian provinsi yang tinggi memberikan gambaran bahwa implementasi dimensi kinerja secara substantif telah berhasil diterapkan di wilayah lain. Hal ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus menyempurnakan kualitas layanan perpustakaan agar lebih kompetitif secara regional.

Efisiensi Sumber Daya dari sisi anggaran, indikator ini didukung Program Pembinaan Perpustakaan dengan Pagu sebesar Rp1.332.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.299.610.029 (97,57%). Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
IPLM	118,00%	1.332.000.000	1.299.610.029	97,57%	272.149.971	1.571.760.000	17,31%

Dapat disimpulkan bahwa Program Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2025 telah dijalankan secara efektif dan efisien. Terdapat selisih positif antara nilai manfaat dengan realisasi anggaran sebesar Rp272.149.971, dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk indikator IPLM adalah sebesar 17,31%.

e. Sasaran Strategis 5 : Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat.

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 5 telah dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel 3.5

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5

Sasaran Srategis 5 : Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat									
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian Provinsi	Target Akhir Renstra
					2024	2023	2022		
1	Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	61	58,97	96,7%	66,80	57,68	52,64	57,11	65,00

Pada tahun 2025, Indikator Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) mencatatkan realisasi sebesar 58,97 dari target yang ditetapkan sebesar 61, atau mencapai persentase kinerja 96,7%. Penting untuk dipahami bahwa pengukuran TKM tahun ini menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.

Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Saat ini, fokus pengukuran TKM terbagi ke dalam tiga dimensi substantif:

- Dimensi Pra Membaca: Bobot sebesar 15%.
- Dimensi Saat Membaca: Bobot dominan sebesar 50%.
- Dimensi Pasca Membaca: Bobot sebesar 35%.

**NILAI BUDAYA KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025**

NO	DIMENSI	NILAI
1	Pra Membaca	53,9
2	Saat Membaca	57,52
3	Pasca Membaca	63,04
	Nilai TKM	58,97

Capaian angka **58,97** tidak dapat diartikan sebagai penurunan dari tahun 2024 (66,80), melainkan sebuah **baseline baru** dalam kerangka pengukuran kinerja perpustakaan yang lebih mendalam. Angka ini merupakan potret objektif yang diolah dari data faktual hasil verifikasi daerah, sehingga berfungsi sebagai peta instrumen yang jujur. Melalui hasil ini, kebijakan dapat diarahkan secara lebih presisi pada dimensi-dimensi yang mendesak untuk diperkuat. Jika disandingkan dengan skala yang lebih luas, posisi capaian daerah menunjukkan tren yang kompetitif.

Realisasi daerah sebesar 58,97 terpantau berada di atas Capaian Provinsi yang berada pada angka 57,11. Keberhasilan melampaui angka provinsi mengindikasikan bahwa meskipun secara internal target 61 belum terpenuhi 100%, performa pembangunan budaya baca di daerah ini sudah lebih baik dibandingkan rata-rata capaian di tingkat regional.

Efisiensi Sumber Daya dari sisi anggaran, indikator ini didukung Program Pembinaan Perpustakaan dengan Pagu sebesar Rp1.332.000.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.299.610.029 (97,57%). Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	96,67%	1.332.000.000	1.299.610.029	97,57%	(11.937.242)	1.287.672.787	-0,93%

Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai manfaat output dengan realisasi belanja, terdapat nilai negatif sebesar (Rp11.937.242). Hal ini menghasilkan angka Tingkat Efisiensi sebesar -0,93%. Angka efisiensi sebesar -0,93% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berada pada level yang cukup moderat. Hal ini mencerminkan bahwa untuk mencapai target kinerja di tengah perubahan metodologi baru (Perka Perpustnas No. 9 Tahun 2025) yang menitikberatkan pada dimensi proses membaca, diperlukan alokasi sumber daya yang hampir maksimal untuk mendekati target yang telah ditetapkan.

B. Capaian Indikator Program dan Kegiatan 2025

Capaian indikator sasaran strategis tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut capaian indikator program dan kegiatan 2025

Tabel 3.6
Capaian Indikator Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes(%)	82,46	83,24	100,95
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	15	15	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)	100	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD SKPD dalam kondisi baik (%)	80,00	80,00	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	80,00	80,00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor (%)	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Baru Yang Masuk dalam BMD SKPD (Unit)	18	18	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Kegiatan Perkantoran (%)	100	100	100

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	2		3	4	5	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik (%)	100	100	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase Perpustakaan yang dibina, SDM, Pengolahan dan Layanan.(%)	0,13	0,14	107,69
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Aktif (Unit)	40,00	60,00	150
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Gemar Membaca (%)	50,00	67,23	134,46
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Pemkab Brebes(Eksemplar)	1	1	100
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang dapat Teridentifikasi (Eksemplar)	1	5	500
4	Program Pengelolaan Arsip		Persentase Pencipta Arsip Perangkat Daerah yang mengelola arsip Dinamis dan Statis yang terintegrasi(%)	20	94	470
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (Unit)	40	50	125
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola (Arsip)	500	119	238,80

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	2		3	4	5	6
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terlayankan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Berkas)	150	226	150,67
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Presentase Arsip Perangkat Daerah yang Terlindungi dan Terselamatkan(%)	83	105	126,51
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Berkas)	40	52	130

C. Capaian Kinerja Lain

Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Brebes berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan meraih **Peringkat 5** dalam hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kabupaten Brebes dalam mencapai nilai **90,72** dengan predikat **Kategori AA (Sangat Memuaskan)**. Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diterima oleh Plt. Kepala Bidang Kearsipan selaku wakil dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes. Prestasi ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola

kearsipan yang baku, tertib, dan sesuai dengan standar nasional di wilayah Jawa Tengah.

D. Akuntabilitas Keuangan

a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, pada tahun anggaran 2025, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.590.262.890,- (Enam milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.545.464.715,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.572.271.175,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 472.527.000,-

Penggunaan anggaran dan realisasi tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat kami sajikan secara terperinci sebagaimana tertuang dalam tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Program, Anggaran dan Realisasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.039.940.890	4.172.099.644	82,78%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.892.800	28.281.150	97,88%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.791.300	8.570.150	97,48%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.314.000	7.085.500	96,88%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.077.500	3.077.500	100,00%

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.332.000	8.194.000	98,34%
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.378.000	1.354.000	98,26%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.959.015	2.866.025.407	78,07%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.545.464.715	2.744.430.607	77,41%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.445.000	111.715.000	96,77%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.843.000	7.771.000	99,08%
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.206.300	2.108.800	95,58%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.940.800	8.892.800	99,46%
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.940.800	8.892.800	99,46%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.583.800	28.443.800	99,51%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	694.800	694.800	100,00%
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.378.000	1.350.000	97,97%
1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	961.000	875.000	91,05%
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.550.000	25.524.000	99,90%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.927.600	239.752.544	97,89%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.780.000	12.780.000	100,00%
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.304.100	51.413.060	98,30%

1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	1.934.500	96,73%
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.660.000	74.393.000	99,64%
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.192.300	13.192.300	100,00%
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	14.620.000	81,22%
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.210.000	2.116.000	95,75%
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.361.200	67.130.684	99,66%
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.420.000	2.173.000	89,79%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.207.000	277.367.740	98,99%
1.6.1	Pengadaan Mebel	6.622.000	6.537.900	98,73%
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.085.000	56.423.840	97,14%
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.500.000	214.406.000	99,49%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.495.000	556.440.973	91,60%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.020.000	197.365.668	90,11%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.475.000	355.075.305	92,35%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.934.875	166.895.230	98,21%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.401.000	69.261.520	99,80%
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.998.875	30.380.710	92,07%
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	2.400.000	2.400.000	100,00%

1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.800.000	23.770.000	99,87%
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.335.000	41.083.000	99,39%
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.332.000.000	1.299.610.029	97,57%
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.145.000	731.461.528	97,51%
2.1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	39.000.000	38.155.500	97,83%
2.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.981.500	25.716.056	91,90%
2.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	59.783.300	59.628.416	99,74%
2.1.4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.670.000	28.057.140	97,86%
2.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.500.000	96.839.596	94,48%
2.1.6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	258.710.200	256.816.200	99,27%
2.1.7	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	224.000.000	216.848.620	96,81%
2.1.8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.500.000	9.400.000	98,95%
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	581.855.000	568.148.501	97,64%
2.2.1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.358.000	97,43%
2.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71.695.000	67.467.500	94,10%

2.2.3	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	27.975.000	99,91%
2.2.4	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	216.000.000	211.937.600	98,12%
2.2.5	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	241.160.000	236.410.401	98,03%
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	18.000.000	15.275.000	84,86%
3.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	15.275.000	84,86%
3.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.000.000	15.275.000	84,86%
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	183.532.200	180.430.525	98,31%
4.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	108.692.450	107.048.353	98,49%
4.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60.077.150	59.449.853	98,96%
4.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48.615.300	47.598.500	97,91%
4.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	31.101.250	30.785.020	98,98%
4.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	31.101.250	30.785.020	98,98%
4.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	43.738.500	42.597.152	97,39%
4.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	6.600.000	6.140.000	93,03%
4.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	37.138.500	36.457.152	98,17%

5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16.789.800	16.687.800	99,39%
5.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	16.789.800	16.687.800	99,39%
5.1.1	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	16.789.800	16.687.800	99,39%
	TOTAL	6.590.262.890	5.684.102.998	86,25%

Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes T.A 2025

NO	URUSAN	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
	BELANJA DAERAH	6.590.262.890,00	5.684.102.998,00	86,25
1	BELANJA OPERASI	6.117.735.890,00	5.215.028.258,00	85,24
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.117.735.890,00	5.215.028.258,00	85,24
2	BELANJA MODAL	472.527.000,00	469.074.740,00	99,27
	JUMLAH BELANJA MODAL	472.527.000,00	469.074.740,00	99,27
	JUMLAH	6.590.262.890,00	5.684.102.998,00	86,25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2025 dari jumlah anggaran Rp. 6.590.262.890 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.684.102.998 atau 86,25%. Terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 5.215.028.258 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 469.074.740.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Secara umum, kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes pada tahun anggaran 2025 menunjukkan performa yang **positif dan akuntabel**. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan, instansi telah berhasil menyelaraskan manajemen sumber daya—baik manusia, anggaran, maupun sarana prasarana—secara efektif dan efisien demi mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Keberhasilan ini dibuktikan dengan mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencapai, bahkan melampaui target dengan **kategori Baik hingga Sangat Baik**. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, terdapat beberapa poin strategis yang menjadi catatan penting dalam tinjauan kinerja tahun ini :

1. **Kepercayaan dan Kepuasan Publik** : Dinas berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik yang prima, tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai **83,24** (melebihi target 82,46). Hal ini menunjukkan bahwa layanan kearsipan maupun perpustakaan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes.;
2. **Evaluasi Dinamika Pengunjung Perpustakaan** : Meskipun persentase peningkatan pengunjung perpustakaan mencapai **11,27%** (dari target 45%), angka ini tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Realisasi yang belum mencapai target maksimal ini menjadi basis evaluasi bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes untuk memperkuat strategi inovasi layanan, baik melalui optimalisasi perpustakaan digital

maupun perluasan jangkauan perpustakaan keliling di masa mendatang;

3. **Akselerasi Digitalisasi Kearsipan** Capaian paling signifikan pada tahun ini terlihat pada indikator integrasi perangkat daerah dengan sistem informasi kearsipan yang mencapai **94%**. Realisasi ini menunjukkan lompatan besar dibandingkan target awal yang ditetapkan sebesar **35%**. Prestasi ini menjadi bukti nyata adanya komitmen kuat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern. Transformasi kearsipan digital yang masif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes ini tidak hanya melampaui target secara kuantitatif, tetapi juga mempercepat terciptanya ekosistem birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel.
4. Transformasi Pengukuran IPLM dan TKM, Indikator Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (**IPLM**) dan Nilai Budaya Kegemaran Membaca (**TKM**) tahun ini menjadi titik balik dengan penggunaan metodologi terbaru sesuai Perka Perpustnas No. 7 dan No. 9 Tahun 2025.
 - **IPLM:** Mencapai nilai **13,57** (118% dari target). Pengukuran kini menitikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70%. Program ini berjalan sangat efisien dengan tingkat efisiensi **17,31%**.
 - **TKM:** Mencapai nilai **58,97**. Meskipun secara nominal berbeda dengan tahun sebelumnya, angka ini merupakan baseline baru yang lebih substantif, berfokus pada dimensi pra, saat, dan pasca membaca.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Guna mengoptimalkan capaian kinerja dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Akselerasi Transformasi Digital dan Integrasi Sistem

- Memperkuat implementasi aplikasi kearsipan digital (seperti SRIKANDI) hingga menjangkau seluruh unit kerja terkecil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengembangkan perpustakaan digital (*e-library*) yang lebih user-friendly untuk mempermudah akses koleksi tanpa batasan ruang dan waktu.

2. Penguatan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

- Mentransformasi peran perpustakaan tidak sekadar tempat membaca, namun menjadi pusat kegiatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi warga.
- Memperluas kemitraan dengan komunitas lokal, sekolah, dan sektor swasta dalam mengampanyekan gerakan literasi daerah.

3. Inovasi Layanan dan Pemerataan Akses

- Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling dan pojok baca di titik-titik strategis atau wilayah terpencil untuk meningkatkan angka kunjungan dan minat baca masyarakat.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan IPTEK terkini.

4. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme SDM

- Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan sertifikasi secara berkala bagi pustakawan dan arsiparis agar memiliki keahlian yang sesuai dengan standar nasional dan tuntutan era digital.
- Mendorong budaya kerja inovatif bagi aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

5. Optimalisasi Preservasi dan Penyelamatan Arsip Daerah

- Melakukan digitalisasi arsip-arsip vital dan bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai upaya penyelamatan memori kolektif bangsa.
- Meningkatkan standar sarana prasarana penyimpanan arsip (Depo Arsip) yang sesuai dengan kaidah kearsipan nasional guna menjamin keamanan dokumen.

6. Penguatan Sinkronisasi Data Makro

- Membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Perpustakaan Nasional dan Dinas Kearsipan Provinsi untuk memastikan ketersediaan data capaian (seperti IPLM dan TGM) secara tepat waktu guna keperluan evaluasi kinerja berkala.

Seluruh strategi di atas akan diintegrasikan ke dalam rencana kerja tahunan dengan dukungan anggaran yang efisien, sehingga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat dan nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Brebes.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi sekaligus menjadi sarana pertanggungjawaban kepada publik. Segala keberhasilan yang dicapai akan terus dipertahankan, sementara kekurangan yang ditemukan akan menjadi bahan evaluasi mendalam demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU LL 4

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) 671779 Brebes 52211

Laman: inspektorat@brebeskab.go.id, Pos-el: inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/89/Tim I/II/2026

Brebes, 2 Februari 2026

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Reviu LKjIP
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
(Dinarpus) Kabupaten Brebes Tahun 2025

Yth. Bupati Brebes

Di Brebes

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor 094/00974/2026, kami telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Brebes Tahun 2025. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan handal. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Dinarpus Kabupaten Brebes. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. LKjIP telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, namun belum disertai penjelasan atau deskripsi yang cukup.
2. Realisasi kinerja tidak dibandingkan dengan standar nasional/provinsi/regional. Jika tidak terdapat standar nasional/provinsi/regional, sebaiknya dijelaskan atau dinarasikan dalam LKjIP.
3. LKjIP telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, namun belum disertai analisis perhitungan dan narasi yang memadai.
4. LKjIP belum menyajikan analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
5. LKjIP belum disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan berupa data dukung realisasi kinerja.

Demikian laporan hasil review ini kami susun untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

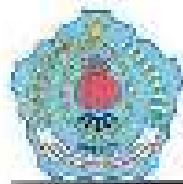


Inspektur Daerah Kabupaten Brebes

Drs. Apriyanto Sudarmuka
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19730413 199303 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Perpustakaan (Dinarpas) Kabupaten Brebes;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
3. Arsip.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. TAHRONI, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BREBES

Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pemerintah Kabupaten Brebes
NIP. 19710509 198602 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes (%)	82,46	
Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (%)	45,00	45,00
Meningkatkan Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuj Tertib Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang Mengelola Sistem Kearsipan yang Terintegrasi (%)	35,00	35,00
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	11,50	11,50
Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	61,00	61,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.509.240.900	5.039.940.890	Sumber Dana PAD/ DAI
2	Pembinaan Perpustakaan	1.332.000.000	1.332.000.000	Sumber Dana DAI/ DAK
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	18.000.000	18.000.000	Sumber Dana DAI
4	Pengelolaan Arsip	298.211.000	183.532.200	Sumber Dana PAD
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	16.789.800	16.789.800	Sumber Dana PAD
	TOTAL	7.174.240.900	6.590.262.890	

Brebes, 1 September 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten

Pihak Kedua,
BUPATI BREBES

Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Literasi Muda
NIP. 19710609 199802 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI ADI KOMARA, M.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TAHRONI, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selaku alasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Brebes

HENDRI ADI KOMARA, M.Pd
Peminda
NIP. 19780508 200904 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(3)
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	15 dokumen	15 dokumen
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Rasio implementasi pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	100 %
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100 %	100 %
Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	20 unit	18 unit
Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat kelancaran kegiatan perkantoran	100 %	100 %
Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD SKPD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	100 %
Meningkatnya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	80 %	80 %
Terselenggaranya pelayanan Administrasi Kepegawalan Daerah	Tingkat Kompetensi dan Kapasitas ASN	80%	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42.776.000	28.892.800	Sumber dana PAD
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.965.986.600	3.670.959.015	Sumber dana PAD/DAU
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.800	8.940.800	Sumber dana PAD
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	52.866.150	28.583.800	Sumber dana PAD

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.941.400	244.927.500	Sumber dana PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.604.000	280.207.000	Sumber dana PAD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	673.140.000	607.495.000	Sumber dana PAD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.932.950	169.934.875	Sumber dana PAD
	TOTAL	5.509.240.900	5.039.940.800	

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHNANI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19750609 199802 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Brebes

HENDRI ADI KOMARA, M.Pd
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELI SILFIAH, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TAHRONI, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


Dr. TAHRONI, M.Pd
Pemuda Muda
NIP. 19710609-199802 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


NELI SILFIAH, SE, M.Si
Pegawai Tk.1
NIP. 19770610 199703 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(3)
Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang aktif	40 unit	40 unit
	Jumlah Perpustakaan Yang Bertransformasi dan Menjadi Pusat Pembudayaan Masyarakat	4 Unit	4 Unit
	Jumlah Perpustakaan Yang Membina Dalam Mendukung Pendidikan Anak Usia Sekolah	40 Unit	40 Unit
Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat	61	61
Terselenggaranya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/ kota	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh penkab brebes	1 eksemplar	1 eksemplar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	750.145.000	750.145.000	Sumber dana DAK/DAU
2	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	581.855.000	581.855.000	Sumber dana DAK/DAU
3	Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	18.000.000	18.000.000	Sumber dana DAU
	TOTAL	1.350.000.000	1.350.000.000	

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



DA TAHIRONI, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


NELI SILFIAH, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19770610 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Raya Ular Nomor 02 Telepon (0283) 671371 Faksimile (0283) 673025
Email : dinarpus.brebeskab.go.id, Pos-el : dinarpus.brebes@yahoo.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini..

Nama : KURSIN, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ADI KOMARA, M.Pt

Jabatan : Plt. Kepala DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes

sebagai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes



HENDRI ADI KOMARA, S.Pt, M.Pt

Plt. Kepala

NIP. 198503 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes

KURSIN, S.Sos, M.M

Penata Tk. I

NIP. 19630724 200904 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(3)
Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang aktif	40 unit	40 unit
	Jumlah Perpustakaan Yang Bertransformasi dan Menjadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat	4 Unit	4 Unit
	Jumlah Perpustakaan Yang Membina Dalam Mendukung Pendidikan Anak Usia Sekolah	40 Unit	40 Unit
Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat	61	61
Terselenggaranya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/ kota	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh Pemkab brebes	1 eksemplar	1 eksemplar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	750.145.000	750.145.000	Sumber dana DAK/DAU
2	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	581.855.000	581.855.000	Sumber dana DAK/DAU
3	Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	18.000.000	18.000.000	Sumber dana DAU
TOTAL		1.350.000.000	1.350.000.000	

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
PE. Kepala DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes


HENDRI ADI KOMARA, S.Pt, M.Pt
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perpustakaan DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN Kabupaten Brebes


KURSIN, S.Sos, M.M
Penata Tk. I
NIP. 19830724 200904 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURYANI, S.E, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ADI KOMARA, S.Pt, M.Pt
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pjt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


HENDRI ADI KOMARA, S.Pt, M.Pt
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes


MURYANI, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19720506 199203 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KEARSIPAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip dinamis sesuai norma dan standar prosedur dan kriteria	40 Unit	40 Unit
Meningkatnya pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	500 arsip	500 arsip
Terselenggaranya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Jumlah arsip yang tertayarkan melalui JIKN	150 berkas	150 berkas
Terselenggaranya pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	40 berkas	40 berkas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	64.739.500,00	48.615.300,00	Sumber dana PAD
2	Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	52.375.750,00	31.101.250,00	Sumber dana PAD
3	Pengelolaan simpul jaringan Informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	98.949.200,00	43.738.900,00	Sumber dana PAD
4	Perlindungan dan penyelamatan arsip	16.789.000,00	15.789.800,00	Sumber dana PAD
	TOTAL	232.853.450,00	140.244.850,00	

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
PIL. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

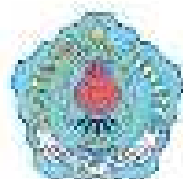
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes



HENDRI ADI KOMARA, S.Pt, M.Pt
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003



MURYANI, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19720508 199203 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURAINI PUJIASTUTI, SE

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ADI KOMARA, M.Pt

Jabatan : Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebermasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

HENDRI ADI KOMARA, M.Pt
Pembin
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kasubag Program dan Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

NURAINI PUJIASTUTI, SE
Penata
NIP. 19830803 201502 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

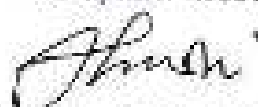
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	4 dokumen	4 dokumen
	Tersedianya dokumen RKA & laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen
	Tersedianya dokumen DPA & laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen
	Tersedianya Laporan capaian kinerja, Ikhtisar realisasi kinerja, Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan
	Tersedianya Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan	23 Orang	20 Orang
	Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	95 dokumen	95 dokumen
	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	15 laporan	15 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.524.500	8.791.300	Sumber dana PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.773.000	7.314.000	Sumber dana PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.837.500	3.077.500	Sumber dana PAD

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.332.000	8.332.000	Sumber dana PAD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.309.000	1.378.000	Sumber dana PAD
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.830.826.200	3.545.464.715	Sumber dana PAD/DAU
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	121.384.400	115.445.000	Sumber dana PAD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.793.000	7.843.000	Sumber dana PAD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.983.000	2.206.300	Sumber dana PAD
TOTAL		4.008.762.600	3.699.851.815	

Brebes, 1 September 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

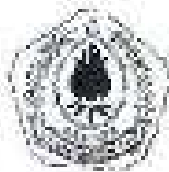


HENDRI ADI KOMARA, M.Pd
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kasubag Program dan Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



NURAINI PUJIASTUTI, SE
Penata
NIP. 19890803 201502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Raya Gor No. 2 Gandasuli Brebes Telp. (0283) 671371-671156
Fax: (0283) 673036 Kode Pos 52215 Email : dinarpus.brebes@yahoo.com
Website : <https://dinarpus.brebeskab.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOKHAMAD RIZKA ALGHIFARY, S.E.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ADI KOMARA, M.Pt.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

HENDRI ADI KOMARA, M.Pt.
Perbina
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

MOKHAMAD RIZKA ALGHIFARY, S.E.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19990424 202012 1 003

PEUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	1 laporan	1 laporan
2	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang
3	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket
		tersedianya paket alat dan perlengkapan kantor	1 paket	1 Paket
		tersedianya paket peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 Paket
		tersedianya paket bahan logistik kantor	1 paket	1 Paket
		tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 Paket
		tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen
		tersedianya laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	10 laporan

		tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	10 laporan
		tersedianya dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya paket mebel	4 unit	4 unit
		tersedianya unit peralatan & mesin lainnya	10 unit	10 unit
		Tersedianya unit sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit
5	Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terselenggaranya kegiatan jasa surat menyurat	1045 dokumen	1045 dokumen
		tersedianya laporan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik	4 laporan	4 laporan
		Tersedianya laporan penyediaan jasa umum kantor	25 laporan	25 laporan
6	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpelihara dan terbayarnya pajak Kendaraan dinas perorangan/ jabatan	9 Unit	9 Unit
		Terpelihara dan terbayarnya pajak Kendaraan dinas operasional/lapangan	3 Unit	3 Unit
		Terpeliharanya mebel	3 Unit	3 Unit
		Terpeliharanya peralatan & mesin lainnya	10 unit	10 unit
		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.941.800	8.940.800	Sumber dana PAD
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.000.000	0	Sumber dana PAD

3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.000.200	694.800	Sumber dana PAD
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.695.350	1.378.000	Sumber dana PAD
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.613.600	961.000	Sumber dana PAD
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.550.000	25.550.000	Sumber dana PAD
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.980.000	12.780.000	Sumber dana PAD
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.304.100	52.304.100	Sumber dana PAD
9	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	Sumber dana PAD
10	Penyediaan bahan logistik kantor	72.010.000	74.660.000	Sumber dana PAD
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.442.000	13.192.300	Sumber dana PAD
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	Sumber dana PAD
13	Fasilitasi kunjungan tamu	2.210.000	2.210.000	Sumber dana PAD
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.686.000	67.361.200	Sumber dana PAD
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.460.000	2.420.000	Sumber dana PAD
16	pengadaan mebel	0	66.622.000	Sumber dana PAD
17	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	93.784.000	58.085.000	Sumber dana PAD
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.620.000	215.500.000	Sumber dana PAD
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	Sumber dana PAD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.020.000	219.020.000	Sumber dana PAD
21	Penyediaan jasa umum kantor	360.120.000	384.475.000	Sumber dana PAD
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan	80.375.000	69.401.000	Sumber dana PAD

	Dinas Jabatan			
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.202.950	32.998.875	Sumber dana PAD
24	Pemeliharaan Mebel	3.200.000	2.400.000	Sumber dana PAD
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000	23.800.000	Sumber dana PAD
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.655.000	41.335.000	Sumber dana PAD
	TOTAL	1.500.478.300	1.340.089.075	

Brebes, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



HENDRI ADI KOMARA, M.Pd
Pembina
NIP. 19780508 200904 1 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegowalan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



MOKHAMAD RIZKA ALGHIFARY, S.E.
Perata Muda Tk. I
NIP. 19890424 202012 1 003

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
BAB III	8
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	8
BAB IV	11
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 66703 orang dan sampel sebanyak 461 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 461 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

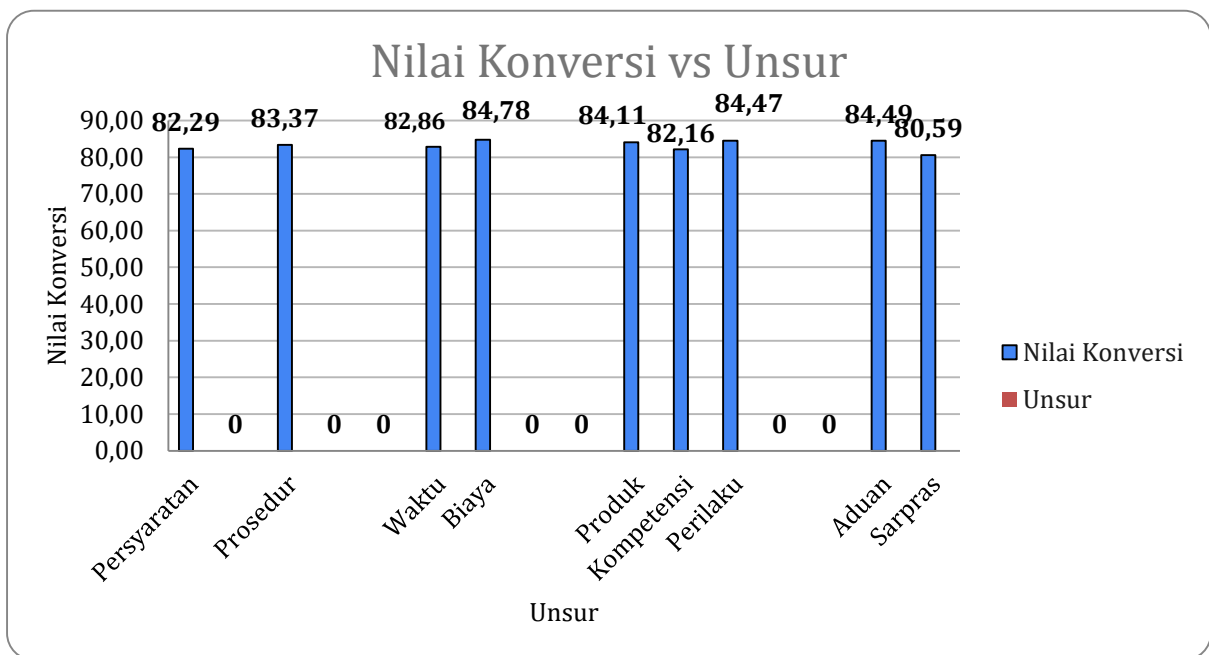
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	242	52,9%
		Perempuan	219	47,51%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	5	1,08%
		SD/Sederajat	21	4,56%
		SMP/Sederajat	129	27,98%
		SMA/Sederajat	159	34,49%
		D1/D2/D3	21	4,56%
		D4/S1	106	22,29%
		S2	20	4,34%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	149	32,32%
		TNI	2	0,43%
		POLRI	2	0,43%
		Swasta	34	7,38%
		Wirausaha	45	9,76%
		Ibu Rumah Tangga	21	4,56%
		Pelajar/Mahasiswa	162	35,14%
		Petani/Nelayan	-	-
		Pekerja Lepas/Freelance	44	9,54%

		Pensiunan	-	-
		Lainnya	2	0,43%
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	461	99.13%
		Disabilitas	4	0,87%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Bidang	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Bidang Perpustakaan	Layanan Pembuatan KTA	81	99,46	98,19	97,19	99,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,42
2.	Bidang Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	23	91,85	99,64	99,74	99,64	96,74	97,83	96,01	82,61	97,83	95,43
3.	Bidang Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	258	76,45	78,17	77,71	79,17	78,29	76,36	76,68	81,98	73,55	77,82
4.	Bidang Kearsipan	Layanan Kearsipan	99	81,62	82,85	83,57	84,36	83,84	80,37	83,86	82,70	79,88	82,56
Rerata IKM Per Unsur				82,29	83,37	82,86	84,78	84,11	82,16	84,47	84,49	80,59	83,24
IKM Unit Layanan				B									
Mutu Unit Layanan				Baik									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan Biaya dan Aduan merupakan 2 (dua) isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarpras mendapatkan nilai terendah yaitu 80,59, Selanjutnya Kompetensi yang mendapatkan nilai 82,16 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

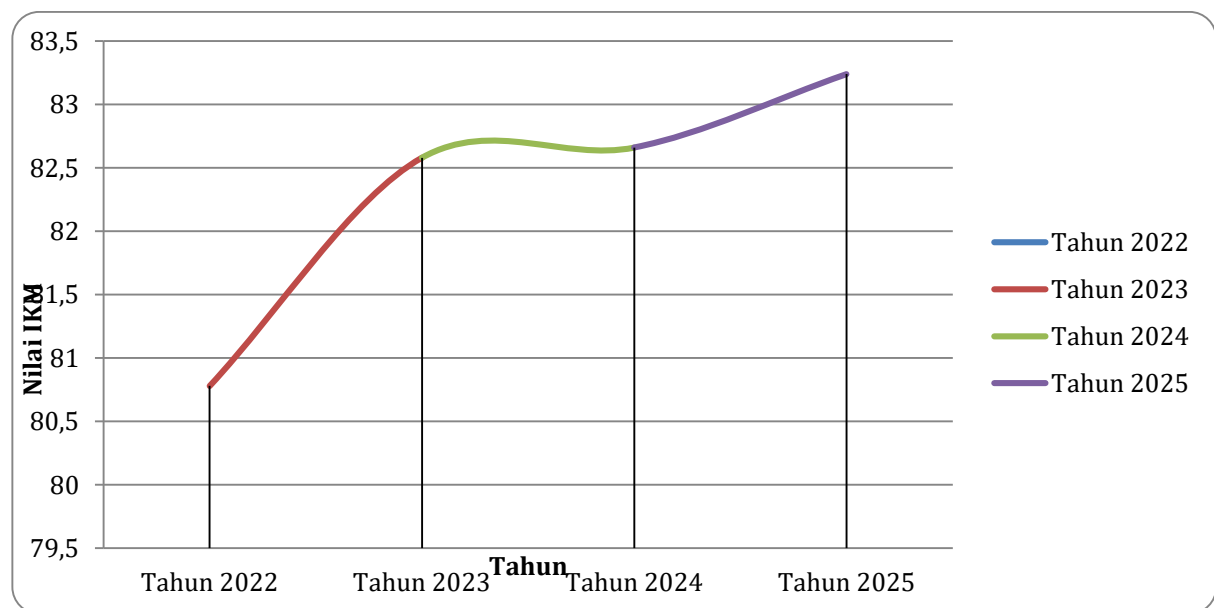
Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan perbaikan layanan dengan sarpras yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur

pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No.	Unsur	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Sarpas	Sarana yang dirasa masih kurang	Menyelenggarakan FKP untuk Sarana Prasarana Pelayanan
2	Kompetensi	Belum maksimalnya pelayanan	Peningkatan Sosialisasi Pelayanan Digital baik di Perpustakaan maupun Kearsipan

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pola yang peningkatan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,18
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,21
3	Waktu Penyelesaian	3,15
4	Biaya/Tarif	3,91
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,12
6	Kompetensi Pelaksana	3,19
7	Perilaku Pelaksana	3,27
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,27
9	Sarana dan Prasarana	3,76

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Peningkatan Sosialisasi Pelayanan Digital baik di Perpustakaan maupun Kearsipan	Sudah	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan telah dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Dinarpus Brebes pada Triwulan ke III	
2	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	Sudah	Pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i> diikuti oleh Pegawai Bidang Pepustakaan	

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 491 orang mengisi SKM pada Dinas Kebersihan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes di tahun 2025. Layanan Perpustakaan menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 281 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kebersihan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83,24.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarpras dan Kompetensi.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Kebersihan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah/belum menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (persentase dihitung dari realisasi tindak lanjut) $\text{jumlah rencana tindak lanjut} \times 100\%$

Brebes, 17 November 2025

Pt. Kepala Dinas Kebersihan dan
Perpustakaan
Kabupaten Brebes



Herdi Adi Komara, M.Pi
NIP 19780506 200904 1 003

LAMPIRAN

1. Kuesioner

06/2022 09/12/2022

Uraian Kuesioner

Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Responden 1 | Pada: Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Tanggal Menerima Layanan : 8 September 2022
 Jenis Layanan : Layanan Pengaduan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : S1/Manajemen
 Usia : kurang dari 17 tahun
 Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
 Kategorisasi Pengguna : Non Pengguna
 Jenis Distribusi : -

No	Pernyataan	Nilai
1	Kesediaan pelayanan pengguna	4
2	Kemudahan mencari	4
3	Kepuasan waktu pelayanan	4
4	Kemajuan biaya / tanpa biaya	4
5	Kemudahan pribadi dengan kebutuhan	4
6	Kemampuan / kemampuan pegawai	4
7	Kesopanan dan keramahan pegawai	4
8	Kepuasan informasi layanan	4
9	Kemudahan akses layanan	4
10	Kepuasan jadwal layanan	4
11	Kemampuan diskursus	4
12	Kemudahan layanan	4
13	Penggunaan layanan	4
14	Sarana prasarana pelayanan	4
15	Kemudahan akses layanan	4
16	Indeks pengguna	4

Ketika dan Sekian

06/2022 09/12/2022

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



REKAPITULASI DATA PENGUNJUNG
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

NO	BULAN	PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN							TOTAL PENGUNJUNG
		PERPUSDA	HLISLITE	PUSUNG	E-PUSDA	I-BREBES	POCADI	LAPAS	
1	JANUARI	926	2571	969	25	9	40	34	5572
2	FEBRUARI	864	5367	267	76	18	43	26	6623
3	MARET	678	2299	0	29	6	71	33	3069
4	APRIL	975	2881	62	73	10	34	37	5022
5	MEI	1045	3212	918	52	13	66	29	5275
6	JUNI	1223	3171	907	99	18	136	36	5206
7	JULI	1203	4327	808	89	14	101	59	6651
8	AUGUSTUS	1237	3624	567	47	13	43	44	5595
9	SEPTEMBER	1122	4073	723	40	26	77	58	6059
10	OKTOBER	1353	9989	1122	65	21	67	52	12649
11	NOVEMBER	963	5692	1233	29	14	50	47	8012
12	DESEMBER	731	3630	900	30	12	67	58	5258
TOTAL		12302	52618	7994	534	210	725	557	74940

Brebek, 7 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


Hendri Adi Kurnia, S.Pt., M.Pt.,
E. Pombia-1976
NIP. 19760508 200904 1 003

Lampiran Data Dukur Pengujung Perpuatakaan Tahun 2025

1. Data Pengunjung Individu Tahun 2025



3. Data Pengunjung Perpustakaan Lapas Brebes Tahun 2025

A handwritten table with multiple columns and rows, containing numerical data and some text. The handwriting is in Indonesian. The table appears to be a summary of visitor statistics.

A handwritten table with multiple columns and rows, containing numerical data and some text. The handwriting is in Indonesian. The table appears to be a summary of visitor statistics.

4. Data Pengunjung Perpustakaan Keililing Tahun 2025

A handwritten table with multiple columns and rows, containing numerical data and some text. The handwriting is in Indonesian. The table appears to be a summary of visitor statistics.



Brebes, 2 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes


Handri Adi Komara, S.Pt., M.Pt.
Kabins Wa
No. 15786508 200904 1 003

Data Rincian Pengunjung Tahun 2025

NO	BULAN	LOKASI	JENIS KELAMIN		KATEGORI						TOTAL PENUNJUNG
			L	P	TK/SD	SMP	SMA	MHS	PEGAWAI	UMUM	
1	JANUARI	PERPUSDA	1054	2064	1101	238	477	328	317	561	3838
		PUSUNG	403	517	957						957
		E-BOOK	28	5						25	25
		POCAPI	22	18						40	40
		LAPAS	29	3						34	34
TOTAL			2036	2669	2268	238	477	328	317	1080	4704
2	FEBRUARI	PERPUSDA	2361	3516	1568	418	1117	317	936	1521	5877
		PUSUNG	123	122	232						232
		E-BOOK	21	34		55					55
		E-BOOK	16	0						18	18
		POCAPI	17	26						43	43
LAPAS	24	2						26	26		
TOTAL			2549	3700	1800	473	1117	317	936	1606	6349
3	MARET	PERPUSDA	777	1540	805	215	485	333	586	589	2517
		PUSUNG									0
		E-BOOK	24	11						35	35
		POCAPI	8	12						21	21
		LAPAS	26	7						33	33
TOTAL			835	1770	805	215	485	333	586	678	2606
4	APRIL	PERPUSDA	1483	2704	1200	318	518	411	637	1085	4187
		PUSUNG									0
		E-BOOK	54	28		62					62
		E-BOOK	18	1						21	21
		POCAPI	22	12						34	34
LAPAS	31	6						37	37		
TOTAL			1588	2755	1200	380	518	411	637	1187	4383
5	MEI	PERPUSDA	1303	2374	1085	444	575	410	333	832	3683
		PUSUNG	211	243	424						424
		E-BOOK	105	281		264					264
		E-BOOK	28	14						52	52
		POCAPI	25	31						56	56
LAPAS	26	3						29	29		
TOTAL			1712	2928	1509	708	575	410	333	970	4638
6	JUNI	PERPUSDA	1512	2041	801	276	538	407	364	1009	3593
		PUSUNG									0
		E-BOOK	106	101		507					507
		E-BOOK	127	74						201	201
		POCAPI	35	80						136	136
LAPAS	33	3						38	38		
TOTAL			1914	2543	801	783	538	407	364	1414	4877
7	JULI	PERPUSDA	1705	2971	526	422	527	651	683	1887	4675
		PUSUNG	204	287	491						491
		E-BOOK	113	104		317					317
		E-BOOK	82	21						132	132
		POCAPI	44	57						101	101
LAPAS	73	21						99	99		
TOTAL			2233	3563	1017	739	527	651	683	2179	5716
8	AGUSTUS	PERPUSDA	1325	3266	489	499	292	195	341	1184	4531
		PUSUNG	157	179	336						336
		E-BOOK	103	123		231					231
		E-BOOK	42	14						70	70
		POCAPI	19	24						43	43
LAPAS	47	7						54	54		
TOTAL			1688	3653	825	739	292	195	341	2331	5321

9	SEPTEMBER	PERPUSDA	2997	3271	186	555	588	291	1358	2190	5724
		PUSUNG	225	338	447						443
		E-BOOK	124	135		240					280
		POKAD	18	51						95	95
		LAPAS	33	45						77	77
		TOTAL	3597	3880	1109	845	588	291	1358	2420	8755
10	OCTOBER	PERPUSDA	7536	5801	1052	435	841	425	2743	7345	16337
		PUSUNG	215	247	437						457
		E-BOOK	203	555		563					565
		POKAD	24	23						46	46
		LAPAS	25	41						71	67
		TOTAL	8003	6667	1539	1008	841	425	2743	8111	17624
11	NOVEMBER	PERPUSDA	2454	2811	247	510	705	267	640	2910	5320
		PUSUNG	572	561		1237					0
		E-BOOK	4	25						29	29
		POKAD	19	31						50	50
		LAPAS	48	3						43	46
		TOTAL	3147	3431	247	1547	705	267	640	3038	6074
12	DECEMBER	PERPUSDA	1458	2253	237	224	618	503	513	1821	4711
		PUSUNG	459	541		500					0
		E-BOOK	16	14							30
		POKAD	26	51						57	57
		LAPAS	51	7						38	55
		TOTAL	2010	3446	237	724	618	503	513	2468	5756
13	2025	PERPUSDA	18314	18907	12570	4484	7471	4422	10033	25057	54820
		PUSUNG	1533	1857	3380	0	0	0	0	0	3380
		E-BOOK	1944	2570	0	4574	0	0	0	0	4574
		POKAD	456	288	0	0	0	0	0	744	744
		LAPAS	316	400	0	0	0	0	0	725	725
		TOTAL	20769	23912	12570	5058	7471	4422	10033	25986	57663



 Ditte, 2 Januari 2025
 M. Guslita, Kepala dan Pengawas
 Kabupaten Bontol

 Guslita, S.Pd, M.Pd
 NIP. 85701506 376904 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang Kode Pos 50263
Telp. (024) 7473746 Faks. (024) 7473800
Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Semarang, 14 Agustus 2025

Nomor : B/000.5.15/390/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Penyampaian Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal
Kabupaten Brebes Tahun 2025

Yth. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Brebes
di
Tempat

Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal Kabupaten/Kota sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat 2 Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019;
2. Sebagai kelengkapan administrasi dalam penyusunan LAKI dan LAKI Konsolidasi yang akan dilaporkan ke Arsip Nasional RI, bersama ini kami sampaikan form hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

FORMULIR HASIL VERIFIKASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

INSTANSI : LKD KABUPATEN BREBES

VERIFIKASI NILAI HASIL PENGAWASAN				
NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SETELAH VERIFIKASI	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Pendapatan Daerah	95,35	95,35	Sesuai
2	Dinas Pekerjaan Umum	94,55	94,55	Sesuai
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94,04	91,83	Bukti dukung tidak lengkap
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	93,26	93,26	Sesuai
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	91,52	80,16	Bukti dukung tidak lengkap
6	BKPSDMD	91,35	80,79	Bukti dukung tidak lengkap
7	Dinas Kesehatan	89,50	89,50	Sesuai
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	88,67	83,49	Bukti dukung tidak lengkap
9	DPMPTSP	88,56	87,64	Bukti dukung tidak lengkap
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	85,84	85,84	Sesuai
11	Dinas Lingkungan Hidup	84,91	84,91	Sesuai
12	Inspektorat Kabupaten Brebes	84,38	84,38	Sesuai
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,22	84,22	Sesuai
14	Sekretariat DPRD	82,53	82,53	Sesuai
15	Dinas Perhubungan	82,47	82,47	Sesuai
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	82,34	82,34	Sesuai
17	Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	81,14	81,14	Sesuai
18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	80,32	80,32	Sesuai
19	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	80,06	80,06	Sesuai
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	79,96	79,96	Sesuai

VERIFIKASI NILAI HASIL PENGAWASAN

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SETELAH VERIFIKASI	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Desa			
21	DP3KB	78,68	78,68	Sesuai
22	Dinas Pengeloaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang	77,69	77,69	Sesuai
23	Dinas Perikanan	77,66	77,66	Sesuai
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	77,27	77,27	Sesuai
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	75,37	75,37	Sesuai
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,71	73,71	Sesuai
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,26	72,26	Sesuai
28	Satuan Polisi Pamong Praja	72,08	72,08	Sesuai
29	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	71,10	71,10	Sesuai
30	Dinas Sosial	70,44	70,44	Sesuai
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	67,70	67,70	Sesuai

Mengetahui
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati,S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

Tim Pengawas

1. Lutfy Hassan, SH
2. Widyawati, S.S.T.Ars
3. Dwi Mikta Anggun P, A.Md

FORMULIR HASIL VERIFIKASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

INSTANSI : LKD KABUPATEN BREBES

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	KESESUAIAN	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai	-
2	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak sesuai	Unit Pengolah 1 - Aspek SDM Pengelola arsip belum mengikuti Diklat Teknis Sertifikat Nondiklat teknis hanya 1 orang Unit Pengolah 2 - Aspek Penyusutan Pemindahan arsip dari UP ke UK belum rutin Daftar Berkas dan Isi Berkas arsip yang dipindahkan tidak ada Pemindahan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun ke LKD belum ada bukti dukung. - Aspek SDM Pengelola arsip belum mengikuti Diklat Teknis Sertifikat Non Diklat Teknis hanya 1 orang Unit Pengolah 3 - Aspek Penyusutan Pemindahan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun ke LKD belum ada bukti dukung. - Aspek SDM Pengelola arsip belum mengikuti Diklat Teknis Sertifikat Non Diklat Teknis hanya 1 orang

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	KESESUAIAN	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak sesuai	Unit Kearsipan - Aspek Pemeliharaan Daftar Arsip Inaktif belum ada - Alih Media Arsip Inaktif tidak ada bukti dukung - Aspek SDM Pimpinan UK belum mengikuti Diklat (tidak ada dukung) - Aspek Sarpras Belum memiliki dehumidifier, CCTV, Smoke Detector, Fire Alarm System.
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai	-
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tidak sesuai	Unit Kearsipan - Aspek Penciptaan Tidak ada bukti dukung - Aspek Penyusutan Tidak ada bukti dukung Pemusnahan Arsip Unit Pengolah 1 - Aspek Pemeliharaan Bukti dukung Berita Acara Alih Media Arsip milik LKD - Aspek Penyusutan Pemindahan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun ke LKD belum ada bukti dukung. - Aspek Sarpras Tidak memiliki guide/sekat Unit Pengolah 2 - Aspek Penyusutan Pemindahan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun ke LKD belum ada bukti dukung. - Aspek SDM Pengelola arsip belum mengikuti diklat maupun bimtek (Ariyanto adalah arsiparis bukan pengelola

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	KESESUAIAN	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
			arsip) - Aspek Sarpras Tidak memiliki guide/sekat Unit Pengolah 3 - Aspek SDM Pengelola arsip belum mengikuti diklat maupun bimtek (Ariyanto adalah arsiparis bukan pengelola arsip) - Aspek Sarpras Tidak memiliki guide/sekat
6	BKPSDMD	Tidak sesuai	Unit Kearsipan - Aspek Penyusutan: Tidak ada bukti dukung Pemusnahan Arsip - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip di Unit Kearsipan belum memiliki sertifikat - Aspek Sarana Prasarana Belum memiliki Dehumidifier Unit Pengolah 1 - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti diklat maupun bimtek (data dukung sertifikat a.n Febi adalah arsiparis, bukan pengelola arsip) Unit Pengolah 2 - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti diklat maupun bimtek (data dukung sertifikat a.n Febi adalah arsiparis, bukan pengelola arsip) Unit Pengolah 3 - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti diklat maupun bimtek (data dukung sertifikat a.n Febi adalah arsiparis, bukan pengelola arsip)

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	KESESUAIAN	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Dinas Kesehatan	Sesuai	-
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sesuai	Unit Pengolah 2 - Aspek Sumber Daya Manusia Dwi Yuliana Adalah arsiparis pada Unit Kearsipan, bukan pengelola arsip Unit Pengolah 2 Unit Pengolah 3 - Aspek Sumber Daya Manusia Dwi Yuliana Adalah arsiparis pada Unit Kearsipan, bukan pengelola arsip Unit Pengolah 2
9	DPMPTSP	Tidak sesuai	Unit Kearsipan - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti bimbingan teknis maupun diklat Unit Pengolah 1 - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti bimbingan teknis maupun diklat Unit Pengolah 2 - Aspek Sumber Daya Manusia Pengelola arsip belum mengikuti bimbingan teknis maupun diklat
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sesuai	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai	-
12	Inspektorat Kabupaten Brebes	Sesuai	-
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	-
14	Sekretariat DPRD	Sesuai	-
15	Dinas Perhubungan	Sesuai	-
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sesuai	-
17	Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Sesuai	-
18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sesuai	-
19	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	Sesuai	-

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	KESESUAIAN	CATATAN VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai	-
21	DP3KB	Sesuai	-
22	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Sesuai	-
23	Dinas Perikanan	Sesuai	-
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sesuai	-
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai	-
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai	-
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai	-
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai	-
29	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Sesuai	-
30	Dinas Sosial	Sesuai	-
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai	-

Mengetahui
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

Tim Pengawas

1. Lutfy Hassan, SH
2. Widyawati, S.S.T.Ars
3. Dwi Mikta Anggun P, A.Md

NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
RSUD DAN KECAMATAN SE - KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4
1	Kecamatan Salem	80.41	A (MEMUASKAN)
2	Kecamatan Wanasari	80.27	A (MEMUASKAN)
3	Kecamatan Tonjong	72.31	BB (SANGAT BAIK)
4	Kecamatan Bantarkawung	70.05	BB (SANGAT BAIK)
5	RSUD Bumiayu	66.36	B (BAIK)
6	Kecamatan Songgom	62.13	B (BAIK)
7	Kecamatan Bumiayu	61.93	B (BAIK)
8	Kecamatan Tanjung	61.25	B (BAIK)
9	Kecamatan Paguyangan	60.94	B (BAIK)
10	Kecamatan Brebes	60.49	B (BAIK)
11	Kecamatan Losari	60.32	B (BAIK)
12	Kecamatan Ketanggungan	60.28	B (BAIK)
13	Kecamatan Kersana	60.21	B (BAIK)
14	Kecamatan Bulakamba	60.14	B (BAIK)
15	Kecamatan Jatibarang	60.03	B (BAIK)
16	Kecamatan Sirampog	60.01	B (BAIK)
17	Kecamatan Banjarharjo	0.00	Tidak Diberikan Opini
18	Kecamatan Larangan	0.00	Tidak Diberikan Opini
19	RSUD Ir. Soekarno	0.00	Tidak Diberikan Opini



Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026
Sifat : Biasa
Lamp. : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. : 1. **Gubernur**
2. **Bupati/Walikota**
di Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 yang merupakan bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah urusan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran IPLM dan TKM dari masa sanggah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hasil pengukuran, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan IPLM dan TKM

IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

2. Penegasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Kewenangan

Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin

keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

3. Integritas Pengukuran

Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Hasil kajian ini merupakan potret awal dari kondisi literasi di setiap daerah yang sekiranya dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan, program, anggaran, dan regulasi yang berpihak pada pembangunan urusan perpustakaan dan literasi di daerah.

Koordinasi lebih lanjut, staf Bapak/Ibu dapat menghubungi Saudara Irhamni di nomor kontak 0888-7707-741.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan



ADIN BONDAR

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.406	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
27	SULAWESI SELATAN	0.517	0.483	0.472	0.531	0.5	0.501	47.74
28	SULAWESI TENGAH	0.255	0.341	0.333	0.269	0.298	0.301	30.04
29	SULAWESI TENGGARA	0.335	0.267	0.259	0.336	0.301	0.298	29.24
30	SULAWESI UTARA	0.374	0.219	0.33	0.494	0.297	0.412	22.18
31	SUMATERA BARAT	0.419	0.424	0.395	0.483	0.421	0.439	43.36
32	SUMATERA SELATAN	0.537	0.409	0.382	0.495	0.473	0.439	37.81
33	SUMATERA UTARA	0.481	0.411	0.393	0.427	0.446	0.41	40.54

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI AKHIR IPLM KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	KAB. ACEH BARAT	0.03	0.45	0.063	0.198	0.24	0.131	7.6
2	KAB. ACEH BARAT DAYA	0.147	0.178	0.127	0.198	0.162	0.163	5.45
3	KAB. ACEH BESAR	0.144	0.214	0.141	0.266	0.18	0.203	4.94
4	KAB. ACEH JAYA	0.296	0.202	0.322	0.383	0.249	0.353	11.96
5	KAB. ACEH SELATAN	0.133	0.164	0.115	0.229	0.148	0.172	8.24
6	KAB. ACEH SINGKIL	0.194	0.322	0.177	0.329	0.258	0.253	6.49
7	KAB. ACEH TAMIANG	0.069	0.09	0.049	0.086	0.08	0.068	4.15
8	KAB. ACEH TENGAH	0.163	0.218	0.122	0.234	0.191	0.178	7.33
9	KAB. ACEH TENGGARA	0.178	0.189	0.254	0.346	0.184	0.3	2.03
10	KAB. ACEH TIMUR	0.111	0.201	0.171	0.29	0.156	0.231	2.31
11	KAB. ACEH UTARA	0.245	0.261	0.181	0.276	0.253	0.228	3.06
12	KAB. ADM. KEP. SERIBU	0.093	0.022	0	0	0.058	0	0.49
13	KAB. AGAM	0.205	0.202	0.238	0.413	0.204	0.326	21.07
14	KAB. ALOR	0.265	0.277	0.246	0.287	0.271	0.267	0.72
15	KAB. ASAHAN	0.037	0.084	0.088	0.085	0.06	0.087	7.89
16	KAB. BADUNG	0.177	0.177	0.161	0.242	0.177	0.202	19.43
17	KAB. BALANGAN	0.137	0.169	0.122	0.208	0.153	0.165	10.72
18	KAB. BANDUNG	0.32	0.299	0.307	0.374	0.309	0.341	12.54
19	KAB. BANDUNG BARAT	0.246	0.293	0.328	0.431	0.269	0.38	17.51
20	KAB. BANGGAI	0.082	0.18	0.127	0.206	0.131	0.167	1.83
21	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0.135	0.197	0.151	0.271	0.166	0.211	19.77
22	KAB. BANGGAI LAUT	0.04	0.069	0.042	0.078	0.055	0.06	4.34
23	KAB. BANGKA	0.068	0.128	0.113	0.144	0.098	0.129	11.96
24	KAB. BANGKA BARAT	0.233	0.231	0.243	0.286	0.232	0.265	25.5
25	KAB. BANGKALAN	0.16	0.277	0.153	0.275	0.218	0.214	2.99
26	KAB. BANGKA SELATAN	0.115	0.154	0.154	0.218	0.134	0.186	15.92
27	KAB. BANGKA TENGAH	0.136	0.103	0.109	0.124	0.12	0.117	11.77
28	KAB. BANJAR	0.229	0.164	0.141	0.265	0.196	0.203	8.95
29	KAB. BANJARNEGARA	0.178	0.105	0.112	0.134	0.141	0.122	11.49
30	KAB. BANTAENG	0.302	0.491	0.254	0.346	0.397	0.3	15.48
31	KAB. BANTUL	0.13	0.185	0.095	0.111	0.158	0.103	8.41
32	KAB. BANYUASIN	0.105	0.107	0.063	0.117	0.106	0.09	6.62
33	KAB. BANYUMAS	0.237	0.327	0.275	0.217	0.282	0.246	12.03
34	KAB. BANYUWANGI	0.117	0.15	0.36	0.397	0.133	0.379	30.52
35	KAB. BARITO KUALA	0.007	0.048	0.004	0.005	0.027	0.004	1.12
36	KAB. BARITO TIMUR	0.106	0.17	0.11	0.189	0.138	0.15	4.75
37	KAB. BARITO UTARA	0.086	0.145	0.046	0.087	0.115	0.066	2.75
38	KAB. BARRU	0.067	0.167	0.156	0.166	0.117	0.161	13.73
39	KAB. BATANG	0.135	0.153	0.211	0.236	0.144	0.224	19.96
40	KAB. BATANGHARI	0.142	0.264	0.113	0.243	0.203	0.178	4.75
41	KAB. BATU BARA	0.14	0.157	0.149	0.207	0.148	0.178	9.89
42	KAB. BEKASI	0.174	0.301	0.328	0.299	0.238	0.313	29.05
43	KAB. BELITUNG	0.158	0.245	0.148	0.249	0.201	0.198	19.78
44	KAB. BELITUNG TIMUR	0.142	0.167	0.19	0.286	0.155	0.238	21.3
45	KAB. BELU	0.117	0.132	0.126	0.181	0.124	0.154	8.61
46	KAB. BENER MERIAH	0.265	0.429	0.254	0.254	0.347	0.254	4.18
47	KAB. BENGKALIS	0.099	0.092	0.084	0.162	0.096	0.123	5.3
48	KAB. BENGKAYANG	0.186	0.272	0.225	0.409	0.229	0.317	29.06
49	KAB. BENGKULU SELATAN	0.155	0.195	0.121	0.178	0.175	0.15	7.79
50	KAB. BENGKULU TENGAH	0.146	0.337	0.185	0.257	0.241	0.221	3.68

51	KAB. BENGKULU UTARA	0.126	0.199	0.109	0.206	0.163	0.158	9.92
52	KAB. BERAU	0.193	0.118	0.136	0.204	0.156	0.17	9.39
53	KAB. BIMA	0.178	0.24	0.173	0.27	0.209	0.221	1.39
54	KAB. BINTAN	0.199	0.204	0.166	0.203	0.201	0.185	6.1
55	KAB. BIREUEN	0.125	0.212	0.142	0.33	0.168	0.236	10.59
56	KAB. BLITAR	0.103	0.201	0.209	0.262	0.152	0.235	21.05
57	KAB. BLORA	0.114	0.19	0.209	0.273	0.152	0.241	21.45
58	KAB. BOALEMO	0.319	0.266	0.32	0.368	0.293	0.344	1.46
59	KAB. BOGOR	0.564	0.589	0.542	0.714	0.577	0.628	9.5
60	KAB. BOJONEGORO	0.184	0.26	0.114	0.283	0.222	0.199	18.11
61	KAB. BOLAANG MONGONDOW	0.291	0.214	0.245	0.206	0.253	0.225	4.38
62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0.069	0.022	0.072	0.186	0.045	0.128	0.34
63	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0.142	0.198	0.156	0.244	0.17	0.2	3.58
64	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	0.144	0.129	0.074	0.1	0.137	0.087	1.99
65	KAB. BOMBANA	0.083	0.158	0.215	0.475	0.121	0.345	23.4
66	KAB. BONDOWOSO	0.076	0.074	0.071	0.092	0.075	0.081	6.22
67	KAB. BONE	0.211	0.277	0.265	0.343	0.244	0.304	17.25
68	KAB. BONE BOLANGO	0.1	0.168	0.127	0.254	0.134	0.19	17.12
69	KAB. BOVEN DIGOEL	0.055	0.106	0.018	0.033	0.08	0.025	0.73
70	KAB. BOYOLALI	0.272	0.164	0.244	0.243	0.218	0.244	20.57
71	KAB. BREBES	0.11	0.243	0.115	0.12	0.177	0.118	13.57
72	KAB. BULELENG	0.202	0.172	0.218	0.314	0.187	0.266	2.53
73	KAB. BULUKUMBA	0.097	0.18	0.119	0.193	0.139	0.156	15.09
74	KAB. BULUNGAN	0.094	0.117	0.143	0.225	0.105	0.184	3.84
75	KAB. BUNGO	0.146	0.232	0.23	0.277	0.189	0.254	0.47
76	KAB. BUOL	0.112	0.175	0.11	0.18	0.144	0.145	14.48
77	KAB. BURU	0.078	0.129	0.098	0.157	0.104	0.128	6.02
78	KAB. BUTON	0.16	0.212	0.183	0.293	0.186	0.238	3.97
79	KAB. BUTON SELATAN	0.179	0.259	0.13	0.207	0.219	0.169	6.55
80	KAB. BUTON TENGAH	0.141	0.25	0.161	0.218	0.195	0.189	2.79
81	KAB. CIAMIS	0.108	0.115	0.169	0.261	0.111	0.216	18.42
82	KAB. CIANJUR	0.096	0.11	0.126	0.172	0.103	0.149	11.31
83	KAB. CILACAP	0.211	0.255	0.168	0.326	0.233	0.247	20.81
84	KAB. CIREBON	0.07	0.101	0.129	0.147	0.086	0.138	4.28
85	KAB. DELI SERDANG	0.183	0.162	0.098	0.109	0.172	0.104	8.91
86	KAB. DEMAK	0.07	0.05	0.112	0.106	0.06	0.109	9.42
87	KAB. DHARMASRAYA	0.129	0.229	0.217	0.325	0.179	0.271	19.04
88	KAB. DOMPU	0.306	0.173	0.21	0.28	0.239	0.245	0.58
89	KAB. DONGGALA	0.138	0.137	0.121	0.185	0.137	0.153	5.82
90	KAB. EMPAT LAWANG	0.108	0.235	0.137	0.285	0.171	0.211	17.77
91	KAB. ENREKANG	0.135	0.29	0.279	0.401	0.213	0.34	30.2
92	KAB. FAKFAK	0.114	0.241	0.155	0.182	0.178	0.169	1.34
93	KAB. FLORES TIMUR	0.044	0.073	0.073	0.052	0.059	0.063	0.5
94	KAB. GARUT	0.036	0.047	0.031	0.051	0.042	0.041	4.12
95	KAB. GAYO LUES	0.044	0.068	0.08	0.154	0.056	0.117	9.88
96	KAB. GIANJAR	0.122	0.12	0.122	0.177	0.121	0.149	6.04
97	KAB. GORONTALO	0.171	0.16	0.178	0.229	0.165	0.203	1.37
98	KAB. GORONTALO UTARA	0.046	0.166	0.11	0.232	0.105	0.171	0.74
99	KAB. GOWA	0.18	0.248	0.167	0.268	0.214	0.217	7.75
100	KAB. GRESIK	0.057	0.055	0.053	0.083	0.056	0.068	6.42
101	KAB. GROBOGAN	0.239	0.33	0.294	0.523	0.285	0.408	37.12
102	KAB. GUNUNGKIDUL	0.129	0.153	0.142	0.214	0.141	0.178	16.67
103	KAB. GUNUNG MAS	0.092	0.105	0.053	0.026	0.098	0.04	4.33

104	KAB. HALMAHERA BARAT	0.224	0.171	0.184	0.178	0.198	0.181	1.35
105	KAB. HALMAHERA SELATAN	0.119	0.114	0.082	0.184	0.117	0.133	2.2
106	KAB. HALMAHERA TENGAH	0.14	0.354	0.218	0.402	0.247	0.31	2.73
107	KAB. HALMAHERA UTARA	0.127	0.128	0.104	0.147	0.127	0.125	1.68
108	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0.223	0.308	0.229	0.349	0.266	0.289	27.36
109	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0.101	0.178	0.092	0.21	0.14	0.151	5.84
110	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0.099	0.119	0.143	0.148	0.109	0.146	13.46
111	KAB. INDRAGIRI HILIR	0.155	0.331	0.217	0.322	0.243	0.269	1.87
112	KAB. INDRAGIRI HULU	0.095	0.07	0.025	0.034	0.083	0.03	4.57
113	KAB. INDRAMAYU	0.101	0.078	0.083	0.129	0.089	0.106	2.88
114	KAB. JEMBER	0.172	0.213	0.212	0.264	0.192	0.238	5.59
115	KAB. JENEPONTO	0.226	0.272	0.306	0.297	0.249	0.302	27.48
116	KAB. JEPARA	0.188	0.207	0.187	0.243	0.198	0.215	10.35
117	KAB. JOMBANG	0.079	0.11	0.292	0.369	0.094	0.33	23.58
118	KAB. KAIMANA	0.055	0.016	0.081	0.245	0.036	0.163	4.59
119	KAB. KAMPAR	0.141	0.143	0.243	0.305	0.142	0.274	13.38
120	KAB. KAPUAS	0.112	0.206	0.128	0.253	0.159	0.19	1.17
121	KAB. KAPUAS HULU	0.044	0.1	0.24	0.32	0.072	0.28	21.77
122	KAB. KARANGANYAR	0.114	0.116	0.087	0.141	0.115	0.114	11.43
123	KAB. KARANGASEM	0.082	0.09	0.073	0.145	0.086	0.11	5.72
124	KAB. KARAWANG	0.177	0.187	0.192	0.243	0.181	0.218	4.22
125	KAB. KARIMUN	0.079	0.111	0.075	0.132	0.095	0.104	10.1
126	KAB. KARO	0.045	0.029	0.026	0.038	0.037	0.031	3.32
127	KAB. KAUR	0.183	0.281	0.133	0.187	0.232	0.16	0.25
128	KAB. KAYONG UTARA	0.057	0.119	0.091	0.102	0.088	0.097	5.19
129	KAB. KEBUMEN	0.429	0.25	0.508	0.354	0.34	0.431	40.36
130	KAB. KEDIRI	0.092	0.136	0.103	0.148	0.114	0.126	4.99
131	KAB. KENDAL	0.158	0.169	0.182	0.275	0.164	0.228	20.1
132	KAB. KEPAHANG	0.28	0.325	0.231	0.358	0.302	0.295	2.51
133	KAB. KEP. ANAMBAS	0.103	0.167	0.213	0.301	0.135	0.257	14.24
134	KAB. KEPULAUAN ARU	0.133	0.209	0.153	0.2	0.171	0.176	17.46
135	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0.01	0.022	0.068	0.13	0.016	0.099	7.4
136	KAB. KEPULAUAN MERANTI	0.308	0.316	0.227	0.345	0.312	0.286	29.38
137	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	0.068	0.157	0.091	0.146	0.113	0.119	11.69
138	KAB. KEP. SELAYAR	0.041	0.163	0.037	0.054	0.102	0.046	5.72
139	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	0.064	0.074	0.101	0.112	0.069	0.106	9.52
140	KAB. KEPULAUAN SULA	0.068	0.139	0.101	0.154	0.103	0.127	12.01
141	KAB. KEPULAUAN TALAUD	0.139	0.174	0.136	0.232	0.156	0.184	17.58
142	KAB. KERINCI	0.165	0.177	0.271	0.243	0.171	0.257	1.47
143	KAB. KETAPANG	0.083	0.08	0.095	0.137	0.081	0.116	10.55
144	KAB. KLATEN	0.086	0.147	0.115	0.134	0.117	0.125	12.24
145	KAB. KLUNGKUNG	0.077	0.145	0.151	0.23	0.111	0.19	16.69
146	KAB. KOLAKA	0.172	0.252	0.165	0.276	0.212	0.221	3.49
147	KAB. KOLAKA TIMUR	0.166	0.225	0.229	0.275	0.196	0.252	4.05
148	KAB. KOLAKA UTARA	0.277	0.42	0.229	0.26	0.349	0.245	7.14
149	KAB. KONAWE	0.05	0.05	0.045	0.074	0.05	0.06	5.69
150	KAB. KONAWE KEPULAUAN	0.299	0.146	0.265	0.303	0.222	0.284	26.55
151	KAB. KONAWE SELATAN	0.149	0.23	0.147	0.227	0.19	0.187	3.44
152	KAB. KONAWE UTARA	0.065	0.1	0.06	0.032	0.082	0.046	0.34
153	KAB. KOTABARU	0.124	0.244	0.152	0.351	0.184	0.252	10.98
154	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	0.151	0.225	0.071	0.194	0.188	0.132	14.9
155	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0.094	0.144	0.088	0.156	0.119	0.122	3.9
156	KAB. KUANTAN SINGINGI	0.214	0.268	0.306	0.375	0.241	0.34	0.7

157	KAB. KUBU RAYA	0.099	0.164	0.152	0.242	0.132	0.197	3.76
158	KAB. KUDUS	0.154	0.327	0.197	0.301	0.241	0.249	24.65
159	KAB. KULON PROGO	0.233	0.182	0.189	0.289	0.208	0.239	20.47
160	KAB. KUNINGAN	0.177	0.199	0.194	0.249	0.188	0.222	2.99
161	KAB. KUPANG	0.087	0.085	0.097	0.096	0.086	0.097	0.15
162	KAB. KUTAI BARAT	0.125	0.185	0.09	0.141	0.155	0.115	4.04
163	KAB. KUTAI KARTANEGARA	0.283	0.28	0.262	0.267	0.281	0.264	12.81
164	KAB. KUTAI TIMUR	0.152	0.152	0.153	0.224	0.152	0.188	10.05
165	KAB. LABUHANBATU	0.127	0.179	0.107	0.266	0.153	0.187	2.73
166	KAB. LABUHANBATU SELATAN	0.159	0.164	0.127	0.222	0.162	0.174	13.85
167	KAB. LABUHANBATU UTARA	0.038	0.12	0.062	0.126	0.079	0.094	0.81
168	KAB. LAHAT	0.073	0.163	0.074	0.144	0.118	0.109	6.3
169	KAB. LAMANDAU	0.116	0.112	0.093	0.153	0.114	0.123	9.44
170	KAB. LAMONGAN	0.121	0.247	0.179	0.262	0.184	0.22	18.9
171	KAB. LAMPUNG BARAT	0.296	0.496	0.377	0.528	0.396	0.452	15.25
172	KAB. LAMPUNG SELATAN	0.039	0.03	0.042	0.073	0.034	0.058	0.13
173	KAB. LAMPUNG TENGAH	0.027	0.022	0.07	0.063	0.024	0.067	0.05
174	KAB. LAMPUNG TIMUR	0.117	0.173	0.118	0.256	0.145	0.187	12.78
175	KAB. LAMPUNG UTARA	0.098	0.111	0.121	0.103	0.104	0.112	10.98
176	KAB. LANDAK	0.088	0.138	0.043	0.1	0.113	0.072	4.04
177	KAB. LANGKAT	0.138	0.168	0.127	0.22	0.153	0.173	8.9
178	KAB. LEBAK	0.214	0.137	0.199	0.261	0.176	0.23	0.6
179	KAB. LEBONG	0.111	0.184	0.106	0.218	0.147	0.162	6.05
180	KAB. LEMBATA	0.155	0.264	0.167	0.291	0.209	0.229	3.28
181	KAB. LIMA PULUH KOTA	0.184	0.185	0.186	0.264	0.184	0.225	19.87
182	KAB. LINGGA	0.035	0.061	0.124	0.126	0.048	0.126	10.23
183	KAB. LOMBOK BARAT	0.082	0.092	0.113	0.105	0.087	0.109	3.28
184	KAB. LOMBOK TENGAH	0.014	0.024	0.014	0.02	0.019	0.017	1.73
185	KAB. LOMBOK TIMUR	0.223	0.268	0.215	0.274	0.246	0.244	0.81
186	KAB. LOMBOK UTARA	0.036	0.055	0.106	0.088	0.046	0.097	8.15
187	KAB. LUMAJANG	0.091	0.171	0.074	0.127	0.131	0.101	7.29
188	KAB. LUWU	0.068	0.151	0.091	0.165	0.11	0.128	5.53
189	KAB. LUWU TIMUR	0.126	0.126	0.127	0.204	0.126	0.165	15.37
190	KAB. LUWU UTARA	0.157	0.206	0.198	0.324	0.182	0.261	7.01
191	KAB. MADIUN	0.098	0.138	0.096	0.19	0.118	0.143	13.56
192	KAB. MAGELANG	0.193	0.286	0.243	0.222	0.239	0.233	12.31
193	KAB. MAGETAN	0.078	0.042	0.061	0.064	0.06	0.062	6.04
194	KAB. MAJALENGKA	0.102	0.101	0.101	0.149	0.101	0.125	5.78
195	KAB. MAJENE	0.214	0.29	0.199	0.226	0.252	0.213	2.13
196	KAB. MALAKA	0.097	0.05	0.159	0.136	0.073	0.148	0.97
197	KAB. MALANG	0.145	0.154	0.143	0.267	0.149	0.205	5.83
198	KAB. MALINAU	0.143	0.154	0.137	0.193	0.149	0.165	6.34
199	KAB. MALUKU TENGAH	0.142	0.132	0.127	0.16	0.137	0.143	1.45
200	KAB. MALUKU TENGGARA	0.059	0.078	0.074	0.07	0.069	0.072	1.61
201	KAB. MAMUJU	0.181	0.183	0.193	0.283	0.182	0.238	1.23
202	KAB. MANDAILING NATAL	0.028	0.079	0.059	0.107	0.054	0.083	4.75
203	KAB. MANGGARAI	0.143	0.236	0.254	0.313	0.189	0.284	3.47
204	KAB. MANGGARAI BARAT	0.017	0.054	0.016	0.025	0.036	0.02	2.49
205	KAB. MANGGARAI TIMUR	0.03	0.073	0.186	0.217	0.052	0.202	8.65
206	KAB. MANOKWARI	0.397	0.256	0.292	0.425	0.326	0.359	4.36
207	KAB. MAPPI	0.109	0.13	0.11	0.179	0.12	0.144	0.22
208	KAB. MAROS	0.183	0.161	0.231	0.256	0.172	0.243	22.17
209	KAB. MAYBRAT	0.062	0	0.026	0.099	0.031	0.062	0.05

210	KAB. MELAWI	0.104	0.151	0.128	0.215	0.128	0.171	3.75
211	KAB. MEMPAWAH	0.13	0.272	0.123	0.286	0.201	0.204	2.96
212	KAB. MERANGIN	0.09	0.085	0.088	0.13	0.087	0.109	1.94
213	KAB. MERAUKE	0.036	0.074	0.069	0.154	0.055	0.112	0.66
214	KAB. MESUJI	0.115	0.19	0.16	0.242	0.152	0.201	13.76
215	KAB. MIMIKA	0.153	0.352	0.17	0.274	0.253	0.222	3.93
216	KAB. MINAHASA	0.091	0.096	0.085	0.104	0.094	0.094	0.16
217	KAB. MINAHASA SELATAN	0.08	0.101	0.092	0.05	0.09	0.071	0.09
218	KAB. MINAHASA TENGGARA	0.121	0.206	0.222	0.228	0.164	0.225	0.39
219	KAB. MINAHASA UTARA	0.196	0.195	0.18	0.289	0.196	0.235	6.6
220	KAB. MOJOKERTO	0.077	0.064	0.115	0.204	0.071	0.16	13.3
221	KAB. MOROWALI	0.117	0.13	0.084	0.127	0.123	0.106	7.49
222	KAB. MOROWALI UTARA	0.093	0.084	0.08	0.104	0.089	0.092	1.8
223	KAB. MUARA ENIM	0.136	0.154	0.107	0.228	0.145	0.168	9.64
224	KAB. MUARO JAMBI	0.1	0.119	0.077	0.146	0.11	0.111	3.39
225	KAB. MUKO MUKO	0.147	0.133	0.121	0.17	0.14	0.145	0.26
226	KAB. MUNA	0.067	0.138	0.114	0.179	0.103	0.146	4.16
227	KAB. MUNA BARAT	0.073	0.104	0.121	0.13	0.088	0.125	5.84
228	KAB. MURUNG RAYA	0.146	0.305	0.127	0.238	0.226	0.182	0.55
229	KAB. MUSI BANYUASIN	0.153	0.219	0.195	0.268	0.186	0.231	6.03
230	KAB. MUSI RAWAS	0.322	0.43	0.23	0.336	0.376	0.283	6.32
231	KAB. MUSI RAWAS UTARA	0.091	0.254	0.109	0.186	0.172	0.148	14.63
232	KAB. NAGAN RAYA	0.133	0.203	0.106	0.159	0.168	0.132	7.08
233	KAB. NAGEKEO	0.157	0.21	0.148	0.274	0.184	0.211	3.72
234	KAB. NATUNA	0.086	0.109	0.131	0.135	0.097	0.133	10.91
235	KAB. NGADA	0.122	0.3	0.16	0.181	0.211	0.171	2.06
236	KAB. NGANJUK	0.319	0.187	0.365	0.406	0.253	0.385	23.4
237	KAB. NGAWI	0.185	0.197	0.158	0.242	0.191	0.2	10.02
238	KAB. NIAS	0.088	0.134	0.082	0.186	0.111	0.134	1.52
239	KAB. NIAS BARAT	0.295	0.333	0.258	0.246	0.314	0.252	2.65
240	KAB. NIAS SELATAN	0.162	0.116	0.033	0.118	0.139	0.076	0.11
241	KAB. NIAS UTARA	0.109	0.202	0.085	0.117	0.156	0.101	0.15
242	KAB. NUNUKAN	0.104	0.129	0.101	0.167	0.116	0.134	5.31
243	KAB. OGAN ILIR	0.037	0.124	0.05	0.057	0.08	0.054	5.49
244	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0.3	0.413	0.277	0.315	0.356	0.296	30.32
245	KAB. OGAN KOMERING ULU	0.406	0.585	0.375	0.549	0.495	0.462	10.71
246	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	0.147	0.225	0.161	0.288	0.186	0.225	8.76
247	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	0.044	0.132	0.072	0.041	0.088	0.057	5.14
248	KAB. PACITAN	0.108	0.118	0.084	0.144	0.113	0.114	8.01
249	KAB. PADANG LAWAS	0.293	0.335	0.238	0.353	0.314	0.296	1.64
250	KAB. PADANG LAWAS UTARA	0.086	0.164	0.1	0.237	0.125	0.169	1.63
251	KAB. PADANG PARIAMAN	0.103	0.141	0.117	0.212	0.122	0.164	7.79
252	KAB. PAKPAK BHARAT	0.26	0.084	0.105	0.14	0.172	0.123	8.26
253	KAB. PAMEKASAN	0.134	0.235	0.192	0.377	0.184	0.284	4.89
254	KAB. PANDEGLANG	0.179	0.186	0.182	0.247	0.182	0.214	4.87
255	KAB. PANGANDARAN	0.208	0.135	0.2	0.194	0.172	0.197	8.64
256	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.	0.399	0.506	0.52	0.675	0.453	0.597	55.41
257	KAB. PARIGI MOUTONG	0.146	0.15	0.156	0.208	0.148	0.182	2.71
258	KAB. PASAMAN	0.078	0.15	0.11	0.253	0.114	0.181	7.19
259	KAB. PASAMAN BARAT	0.11	0.173	0.108	0.153	0.141	0.131	6.11
260	KAB. PASANGKAYU	0.216	0.284	0.105	0.268	0.25	0.186	3.06
261	KAB. PASER	0.165	0.176	0.147	0.216	0.171	0.181	5.51
262	KAB. PASURUAN	0.151	0.186	0.169	0.332	0.169	0.251	3.18

263	KAB. PATI	0.234	0.274	0.259	0.319	0.254	0.289	11.86
264	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	0	0.045	0.004	0.011	0.023	0.008	0.04
265	KAB. PEKALONGAN	0.225	0.003	0.04	0.025	0.114	0.032	4.71
266	KAB. PELALAWAN	0.158	0.235	0.15	0.254	0.197	0.202	2.96
267	KAB. PEMALANG	0.216	0.236	0.201	0.229	0.226	0.215	14.88
268	KAB. PENAJAM PASER UTARA	0.191	0.177	0.178	0.191	0.184	0.184	18.2
269	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0.086	0.183	0.127	0.14	0.135	0.133	13.37
270	KAB. PESAWARAN	0.031	0.162	0.087	0.097	0.097	0.092	6.37
271	KAB. PESISIR SELATAN	0.197	0.293	0.189	0.259	0.245	0.224	7.06
272	KAB. PIDIE	0.163	0.288	0.203	0.337	0.225	0.27	13.07
273	KAB. PIDIE JAYA	0.225	0.292	0.173	0.397	0.259	0.285	17.62
274	KAB. PINRANG	0.037	0.012	0.123	0.274	0.025	0.198	10.62
275	KAB. POHUWATO	0.118	0.172	0.119	0.231	0.145	0.175	6.85
276	KAB. POLEWALI MANDAR	0.195	0.315	0.229	0.271	0.255	0.25	0.2
277	KAB. PONOROGO	0.156	0.184	0.165	0.244	0.17	0.204	5.89
278	KAB. POSO	0.093	0.114	0.103	0.189	0.104	0.147	6.21
279	KAB. PRINGSEWU	0.086	0.091	0.106	0.15	0.089	0.128	11.13
280	KAB. PROBOLINGGO	0.127	0.083	0.123	0.288	0.105	0.205	15.5
281	KAB. PULANG PISAU	0.048	0.076	0.065	0.07	0.062	0.067	0.54
282	KAB. PULAU MOROTAI	0.201	0.266	0.177	0.28	0.233	0.228	10.74
283	KAB. PULAU TALIABU	0.129	0.161	0.145	0.166	0.145	0.155	10.3
284	KAB. PURBALINGGA	0.157	0.199	0.164	0.298	0.177	0.231	14.07
285	KAB. PURWAKARTA	0.014	0.02	0.018	0.019	0.017	0.019	1.82
286	KAB. PURWOREJO	0.133	0.128	0.116	0.191	0.13	0.153	9.36
287	KAB. REJANG LEBONG	0.166	0.112	0.148	0.211	0.139	0.179	1.95
288	KAB. REMBANG	0.041	0.053	0.04	0.065	0.047	0.053	0.45
289	KAB. ROKAN HILIR	0.136	0.173	0.108	0.216	0.154	0.162	2.8
290	KAB. ROKAN HULU	0.182	0.174	0.144	0.189	0.178	0.167	5.33
291	KAB. ROTE NDAO	0.17	0.137	0.206	0.195	0.154	0.2	9.05
292	KAB. SABU RAIJUA	0.17	0.305	0.205	0.393	0.237	0.299	28.05
293	KAB. SAMBAS	0.047	0.1	0.072	0.103	0.074	0.087	8.34
294	KAB. SAMPANG	0.209	0.229	0.179	0.304	0.219	0.242	2.52
295	KAB. SANGGAU	0.183	0.418	0.565	0.453	0.3	0.509	32.02
296	KAB. SARMI	0.114	0.193	0.094	0.199	0.153	0.146	5.17
297	KAB. SAROLANGUN	0.138	0.128	0.177	0.301	0.133	0.239	20.71
298	KAB. SEKADAU	0.228	0.309	0.211	0.4	0.269	0.305	1.49
299	KAB. SELUMA	0.126	0.179	0.106	0.167	0.152	0.136	7.07
300	KAB. SEMARANG	0.219	0.177	0.215	0.309	0.198	0.262	11.59
301	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	0.179	0.225	0.156	0.289	0.202	0.223	5.78
302	KAB. SERANG	0.211	0.175	0.202	0.292	0.193	0.247	3.52
303	KAB. SERDANG BEDAGAI	0.229	0.195	0.156	0.238	0.212	0.197	1.18
304	KAB. SERUYAN	0.091	0.135	0.134	0.2	0.113	0.167	9.86
305	KAB. SIAK	0.062	0.096	0.086	0.155	0.079	0.121	10.81
306	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0.098	0.157	0.22	0.234	0.128	0.227	19.73
307	KAB. SIDOARJO	0.245	0.272	0.256	0.35	0.259	0.303	10.96
308	KAB. SIGI	0.231	0.11	0.18	0.387	0.171	0.283	22.84
309	KAB. SIJUNJUNG	0.248	0.195	0.2	0.297	0.221	0.248	11.04
310	KAB. SIKKA	0.155	0.135	0.134	0.31	0.145	0.222	1.48
311	KAB. SIMEULUE	0.157	0.133	0.181	0.459	0.145	0.32	0.85
312	KAB. SINJAI	0.076	0.217	0.11	0.156	0.146	0.133	13.7
313	KAB. SINTANG	0.246	0.202	0.146	0.259	0.224	0.203	0.9
314	KAB. SITUBONDO	0.11	0.173	0.118	0.205	0.141	0.162	10.24
315	KAB. SLEMAN	0.182	0.155	0.172	0.251	0.169	0.212	11.14

316	KAB. SOLOK	0.227	0.414	0.352	0.332	0.32	0.342	1.36
317	KAB. SOLOK SELATAN	0.117	0.086	0.127	0.146	0.101	0.137	6.57
318	KAB. SOPPENG	0.058	0.123	0.054	0.163	0.091	0.109	10.34
319	KAB. SORONG	0.329	0.278	0.164	0.291	0.304	0.227	0.88
320	KAB. SRAGEN	0.045	0.069	0.078	0.046	0.057	0.062	6.05
321	KAB. SUBANG	0.107	0.431	0.183	0.292	0.269	0.237	4.81
322	KAB. SUKABUMI	0.049	0.054	0.189	0.229	0.051	0.209	13.66
323	KAB. SUKAMARA	0.126	0.241	0.167	0.262	0.183	0.215	19.17
324	KAB. SUKOHARJO	0.298	0.254	0.287	0.448	0.276	0.368	23.8
325	KAB. SUMBA BARAT	0.123	0.185	0.226	0.331	0.154	0.278	20
326	KAB. SUMBA BARAT DAYA	0.097	0.239	0.09	0.19	0.168	0.14	0.48
327	KAB. SUMBA TENGAH	0.266	0.43	0.272	0.26	0.348	0.266	2.88
328	KAB. SUMBA TIMUR	0.109	0.131	0.129	0.214	0.12	0.171	2.82
329	KAB. SUMBAWA	0.139	0.17	0.154	0.228	0.154	0.191	2.95
330	KAB. SUMBAWA BARAT	0.154	0.227	0.154	0.3	0.191	0.227	13.37
331	KAB. SUMEDANG	0.084	0.117	0.076	0.105	0.1	0.091	8.78
332	KAB. SUMENEP	0.097	0.228	0.244	0.24	0.162	0.242	10.65
333	KAB. SUPIORI	0.039	0.077	0.059	0.159	0.058	0.109	7.94
334	KAB. TABALONG	0.136	0.209	0.229	0.446	0.173	0.338	28.82
335	KAB. TABANAN	0.299	0.333	0.291	0.362	0.316	0.326	0.8
336	KAB. TAKALAR	0.345	0.372	0.279	0.294	0.358	0.287	26.38
337	KAB. TANAH BUMBU	0.05	0.211	0.136	0.235	0.13	0.186	13.92
338	KAB. TANAH DATAR	0.229	0.172	0.255	0.32	0.2	0.288	3.06
339	KAB. TANAH LAUT	0.152	0.16	0.093	0.143	0.156	0.118	4.33
340	KAB. TANA TIDUNG	0.087	0.191	0.103	0.219	0.139	0.161	6.16
341	KAB. TANA TORAJA	0.176	0.389	0.299	0.357	0.283	0.328	1.83
342	KAB. TANGERANG	0.241	0.417	0.289	0.418	0.329	0.354	11.79
343	KAB. TANGGAMUS	0.028	0.077	0.101	0.025	0.053	0.062	5.96
344	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0.254	0.244	0.205	0.363	0.249	0.284	14.19
345	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0.282	0.144	0.2	0.183	0.213	0.192	1.28
346	KAB. TAPANULI SELATAN	0.11	0.14	0.116	0.201	0.125	0.158	6.21
347	KAB. TAPANULI TENGAH	0.112	0.132	0.081	0.136	0.122	0.108	1.28
348	KAB. TAPIN	0.058	0.108	0.081	0.093	0.083	0.087	8.6
349	KAB. TEBO	0.142	0.141	0.187	0.276	0.142	0.232	1.34
350	KAB. TEGAL	0.199	0.25	0.227	0.284	0.225	0.255	6
351	KAB. TELUK BINTUNI	0.09	0.08	0.117	0.06	0.085	0.088	6.58
352	KAB. TELUK WONDAMA	0.162	0.164	0.172	0.313	0.163	0.243	14.83
353	KAB. TEMANGGUNG	0.167	0.259	0.37	0.376	0.213	0.373	24.03
354	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0.103	0.216	0.16	0.216	0.159	0.188	0.34
355	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0.146	0.21	0.171	0.319	0.178	0.245	0.37
356	KAB. TOBA	0.051	0.067	0.181	0.181	0.06	0.181	10.78
357	KAB. TOJO UNA-UNA	0.32	0.178	0.213	0.221	0.249	0.217	8.68
358	KAB. TOLI TOLI	0.21	0.279	0.191	0.299	0.244	0.245	2.22
359	KAB. TRENGGALEK	0.217	0.199	0.206	0.27	0.208	0.238	14.06
360	KAB. TUBAN	0.236	0.185	0.292	0.32	0.211	0.306	12.27
361	KAB. TULANG BAWANG	0.085	0.129	0.075	0.121	0.107	0.098	7.61
362	KAB. TULANG BAWANG BARAT	0.309	0.262	0.291	0.116	0.285	0.204	5.67
363	KAB. TULUNGAGUNG	0.11	0.13	0.175	0.215	0.12	0.195	10.46
364	KAB. WAKATOBI	0.035	0.088	0.085	0.08	0.061	0.082	7.46
365	KAB. WAROPEN	0.032	0.11	0.043	0.145	0.071	0.094	1.48
366	KAB. WAY KANAN	0.389	0.252	0.378	0.544	0.321	0.461	37.15
367	KAB. WONOGIRI	0.086	0.109	0.239	0.333	0.097	0.286	15.83
368	KAB. WONOSOBO	0.122	0.146	0.229	0.286	0.134	0.257	20.41

369	KAB. YAHUKIMO	0.068	0.099	0.068	0.113	0.084	0.09	0.1
370	KOTA AMBON	0.108	0.162	0.095	0.124	0.135	0.11	11.74
371	KOTA BALIKPAPAN	0.303	0.259	0.316	0.396	0.281	0.356	22.83
372	KOTA BANDA ACEH	0.117	0.179	0.176	0.352	0.148	0.264	17.37
373	KOTA BANDAR LAMPUNG	0.089	0.106	0.078	0.186	0.098	0.132	11.11
374	KOTA BANDUNG	0.111	0.137	0.126	0.203	0.124	0.165	15.23
375	KOTA BANJAR	0.113	0.102	0.15	0.225	0.108	0.188	14.65
376	KOTA BANJARBARU	0.139	0.22	0.146	0.247	0.179	0.197	18.49
377	KOTA BANJARMASIN	0.102	0.155	0.104	0.155	0.128	0.13	12.91
378	KOTA BATAM	0.114	0.189	0.142	0.192	0.151	0.167	12.36
379	KOTA BATU	0.417	0.429	0.429	0.647	0.423	0.538	36.57
380	KOTA BEKASI	0.092	0.208	0.087	0.175	0.15	0.131	9.41
381	KOTA BENGKULU	0.242	0.262	0.211	0.373	0.252	0.292	4
382	KOTA BIMA	0.127	0.206	0.157	0.266	0.167	0.212	19.83
383	KOTA BINJAI	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
384	KOTA BITUNG	0.168	0.197	0.146	0.285	0.183	0.215	6.08
385	KOTA BLITAR	0.144	0.155	0.129	0.206	0.15	0.167	15.54
386	KOTA BOGOR	0.208	0.333	0.214	0.274	0.271	0.244	10.02
387	KOTA BONTANG	0.542	0.39	0.466	0.576	0.466	0.521	42.85
388	KOTA BUKITTINGGI	0.414	0.471	0.405	0.469	0.442	0.437	20.06
389	KOTA CILEGON	0.328	0.114	0.364	0.268	0.221	0.316	28.75
390	KOTA CIREBON	0.191	0.274	0.208	0.331	0.233	0.269	9.93
391	KOTA DENPASAR	0.124	0.163	0.236	0.318	0.143	0.277	18.69
392	KOTA DEPOK	0.022	0.052	0.012	0.026	0.037	0.019	2.41
393	KOTA DUMAI	0.087	0.229	0.148	0.291	0.158	0.219	18.44
394	KOTA GORONTALO	0.154	0.157	0.138	0.189	0.156	0.163	16.12
395	KOTA GUNUNGSITOLI	0.124	0.143	0.149	0.144	0.133	0.146	5.5
396	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	0.28	0.222	0.378	0.278	0.251	0.328	30.46
397	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	0.161	0.175	0.176	0.255	0.168	0.216	16.23
398	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	0.491	0.447	0.484	0.454	0.469	0.469	7.24
399	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	0.213	0.197	0.212	0.291	0.205	0.251	5.27
400	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	0.284	0.222	0.39	0.273	0.253	0.332	30.81
401	KOTA JAMBI	0.192	0.177	0.18	0.252	0.184	0.216	10.97
402	KOTA JAYAPURA	0.141	0.18	0.204	0.316	0.161	0.26	6.75
403	KOTA KEDIRI	0.128	0.136	0.239	0.241	0.132	0.24	20.75
404	KOTA KENDARI	0.132	0.154	0.13	0.187	0.143	0.159	13.77
405	KOTA KOTAMOBAGU	0.187	0.251	0.151	0.236	0.219	0.194	8.98
406	KOTA KUPANG	0.146	0.146	0.121	0.269	0.146	0.195	8.81
407	KOTA LANGSA	0.088	0.098	0.116	0.188	0.093	0.152	11
408	KOTA LHOKEUMAWE	0.235	0.181	0.19	0.295	0.208	0.242	16.77
409	KOTA LUBUK LINGGAU	0.113	0.168	0.105	0.216	0.141	0.161	13.64
410	KOTA MADIUN	0.574	0.355	0.64	0.606	0.464	0.623	42.87
411	KOTA MAGELANG	0.253	0.238	0.255	0.375	0.246	0.315	29.4
412	KOTA MAKASSAR	0.226	0.223	0.246	0.29	0.225	0.268	10.24
413	KOTA MALANG	0.322	0.151	0.286	0.294	0.236	0.29	27.41
414	KOTA MANADO	0.234	0.218	0.3	0.292	0.226	0.295	9.23
415	KOTA MATARAM	0.056	0.081	0.061	0.109	0.068	0.085	4.33
416	KOTA MEDAN	0.04	0.027	0.022	0.027	0.034	0.025	2.64
417	KOTA METRO	0.259	0.19	0.28	0.363	0.225	0.321	21.85
418	KOTA MOJOKERTO	0.158	0.236	0.287	0.377	0.197	0.332	29.14
419	KOTA PADANG	0.153	0.259	0.153	0.208	0.206	0.18	18.76
420	KOTA PADANG PANJANG	0.118	0.283	0.237	0.47	0.2	0.353	30.74
421	KOTA PADANG SIDIMPUAN	0.151	0.268	0.127	0.209	0.21	0.168	0.43

422	KOTA PAGAR ALAM	0.08	0.125	0.098	0.174	0.102	0.136	12.59
423	KOTA PALEMBANG	0.095	0.11	0.129	0.205	0.103	0.167	14.78
424	KOTA PALOPO	0.097	0.12	0.104	0.211	0.109	0.157	14.28
425	KOTA PALU	0.179	0.294	0.231	0.439	0.236	0.335	30.54
426	KOTA PANGKAL PINANG	0.134	0.178	0.121	0.19	0.156	0.156	15.59
427	KOTA PARE PARE	0.173	0.135	0.256	0.278	0.154	0.267	23.32
428	KOTA PARIAMAN	0.11	0.171	0.121	0.211	0.141	0.166	11.19
429	KOTA PASURUAN	0.388	0.166	0.378	0.367	0.277	0.373	21.25
430	KOTA PAYAKUMBUH	0.133	0.159	0.126	0.215	0.146	0.171	16.32
431	KOTA PEKALONGAN	0.177	0.172	0.162	0.416	0.175	0.289	18.74
432	KOTA PEKANBARU	0.108	0.173	0.081	0.246	0.141	0.163	15.64
433	KOTA PEMATANG SIANTAR	0.187	0.244	0.257	0.509	0.216	0.383	26.91
434	KOTA PONTIANAK	0.459	0.207	0.322	0.388	0.333	0.355	34.85
435	KOTA PRABUMULIH	0.074	0.311	0.124	0.092	0.192	0.108	11.15
436	KOTA PROBOLINGGO	0.069	0.066	0.083	0.126	0.067	0.105	9.34
437	KOTA SABANG	0.187	0.186	0.086	0.192	0.187	0.139	3.8
438	KOTA SALATIGA	0.18	0.26	0.197	0.289	0.22	0.243	22.99
439	KOTA SAMARINDA	0.343	0.333	0.345	0.42	0.337	0.382	8.71
440	KOTA SAWAHLUNTO	0.239	0.176	0.167	0.214	0.207	0.19	16.17
441	KOTA SEMARANG	0.206	0.339	0.268	0.482	0.273	0.375	17.61
442	KOTA SERANG	0.194	0.207	0.269	0.248	0.201	0.258	10.35
443	KOTA SIBOLGA	0.114	0.176	0.136	0.189	0.145	0.162	15.72
444	KOTA SINGKAWANG	0.13	0.161	0.137	0.204	0.145	0.17	16.28
445	KOTA SOLOK	0.242	0.241	0.24	0.278	0.241	0.259	25.36
446	KOTA SORONG	0.159	0.184	0.115	0.177	0.172	0.146	9.19
447	KOTA SUBULUSSALAM	0.126	0.105	0.096	0.209	0.116	0.153	3.69
448	KOTA SUKABUMI	0.107	0.126	0.113	0.181	0.116	0.147	13.79
449	KOTA SUNGAI PENUH	0.094	0.112	0.046	0.131	0.103	0.089	9.06
450	KOTA SURABAYA	0.71	0.634	0.698	0.78	0.672	0.739	71.9
451	KOTA SURAKARTA	0.302	0.26	0.326	0.467	0.281	0.396	26.54
452	KOTA TANGERANG	0.197	0.202	0.2	0.269	0.2	0.234	9.46
453	KOTA TANGERANG SELATAN	0.04	0.037	0.028	0.041	0.038	0.035	3.57
454	KOTA TANJUNG BALAI	0.171	0.259	0.203	0.244	0.215	0.223	11.41
455	KOTA TANJUNG PINANG	0.148	0.179	0.141	0.252	0.163	0.196	18.65
456	KOTA TARAKAN	0.175	0.196	0.178	0.235	0.185	0.206	16.24
457	KOTA TASEKMALAYA	0.089	0.221	0.136	0.235	0.155	0.185	17.64
458	KOTA TEBING TINGGI	0.062	0.087	0.324	0.679	0.075	0.502	26.84
459	KOTA TEGAL	0.111	0.116	0.102	0.178	0.114	0.14	13.19
460	KOTA TERNATE	0.141	0.193	0.187	0.277	0.167	0.233	8.11
461	KOTA TIDORE KEP.	0.117	0.139	0.124	0.162	0.128	0.143	13.85
462	KOTA TOMOHON	0.065	0.046	0.073	0.037	0.055	0.055	5.51
463	KOTA TUAL	0.137	0.165	0.161	0.246	0.151	0.204	11.5
464	KOTA YOGYAKARTA	0.272	0.286	0.262	0.327	0.279	0.294	25.53
465	KAB. DAIRI	0.041	0.058	0.205	0.279	0.049	0.242	13.64
466	KAB. TAPANULI UTARA	0.01	0.022	0.047	0	0.016	0.023	1.09
467	KOTA PALANGKA RAYA	0.181	0.126	0.174	0.247	0.153	0.211	6.5
468	KAB. BARITO SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
469	KAB. BURU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
470	KAB. BUTON UTARA	0	0	0	0	0	0	0
471	KAB. DEIYAI	0	0	0	0	0	0	0
472	KAB. DOGIYAI	0	0	0	0	0	0	0
473	KAB. ENDE	0	0	0	0	0	0	0
474	KAB. INTAN JAYA	0	0	0	0	0	0	0

475	KAB. JAYAPURA	0	0	0	0	0	0	0
476	KAB. JAYAWIJAYA	0	0	0	0	0	0	0
477	KAB. KEEROM	0	0	0	0	0	0	0
478	KAB. KEP. TANIMBAR	0	0	0	0	0	0	0
479	KAB. KEP. YAPEN	0	0	0	0	0	0	0
480	KAB. LANNY JAYA	0	0	0	0	0	0	0
481	KAB. MALUKU BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0
482	KAB. MAMASA	0	0	0	0	0	0	0
483	KAB. MAMBERAMO TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
484	KAB. MAMUJU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
485	KAB. MANOKWARI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
486	KAB. NDUGA	0	0	0	0	0	0	0
487	KAB. PANIAI	0	0	0	0	0	0	0
488	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
489	KAB. PUNCAK JAYA	0	0	0	0	0	0	0
490	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0
491	KAB. SIMALUNGUN	0	0	0	0	0	0	0
492	KAB. TOLIKARA	0	0	0	0	0	0	0
493	KAB. TORAJA UTARA	0	0	0	0	0	0	0
494	KAB. YALIMO	0	0	0	0	0	0	0
495	KOTA BAUBAU	0	0	0	0	0	0	0

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI TKM PROVINSI

No	Provinsi	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	54.24	58.7	61.92	59.23	rendah
2	Sumatera Utara	54.29	58.91	61.99	59.36	rendah
3	Sumatera Barat	54.55	58.15	63.16	59.42	rendah
4	Riau	53.34	57.72	61.9	58.59	rendah
5	Jambi	53.28	56.82	60.89	57.77	rendah
6	Sumatera Selatan	56.08	60.59	63.1	60.86	rendah
7	Bengkulu	53.02	57.25	60.27	57.74	rendah
8	Lampung	53.95	58.4	61.23	58.79	rendah
9	Kepulauan Bangka Belitung	53.55	57.12	61.02	58	rendah
10	Kepulauan Riau	54.1	58.27	62.89	59.33	rendah
11	DKI Jakarta	51.41	55.61	61.89	57.23	rendah
12	Jawa Barat	53.93	57.81	63.24	59.19	rendah
13	Jawa Tengah	52.18	55.87	60.84	57.11	rendah
14	DI Yogyakarta	50.63	54.12	59.25	55.44	rendah
15	Jawa Timur	53.62	57.9	62.29	58.86	rendah
16	Banten	51.53	55.36	60.16	56.53	rendah
17	Nusa Tenggara Barat	56.04	60.04	64.85	61.19	rendah
18	Nusa Tenggara Timur	55.84	61.42	65.38	62.05	rendah
19	Kalimantan Barat	54.61	59.11	62.95	59.85	rendah
20	Kalimantan Tengah	51.25	55.56	59.18	56.24	rendah
21	Kalimantan Selatan	51.92	56.02	60.69	57.1	rendah
22	Kalimantan Timur	52.7	56.21	62.26	57.86	rendah
23	Kalimantan Utara	53.58	57.73	62.65	58.89	rendah
24	Sulawesi Utara	53.94	57.75	62.05	58.75	rendah
25	Sulawesi Tengah	54.1	58.88	62.54	59.51	rendah
26	Sulawesi Selatan	54.76	58.81	63.29	59.84	rendah
27	Sulawesi Tenggara	53.43	57.8	61.86	58.64	rendah
28	Gorontalo	54.18	58.36	62.37	59.2	rendah
29	Sulawesi Barat	44.54	47.95	51.21	48.63	sangat rendah
30	Maluku	51.94	57.05	59.94	57.38	rendah
31	Maluku Utara	55.61	60.26	63.2	60.66	rendah
32	Papua	46.79	48.77	56.24	51.12	rendah
33	Papua Barat	46.13	50.92	52.38	50.77	rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90

NILAI TKM KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	56.76	60.64	66.59	62.21	rendah
2	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	21.57	23.71	25.33	23.99	sangat rendah
3	Aceh	Kab. Aceh Besar	54.04	58.37	62.23	59.14	rendah
4	Aceh	Kab. Aceh Jaya	56.93	60.85	66.01	62.14	rendah
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan	58.52	63.82	67.49	64.4	rendah
6	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.65	59.29	62.44	59.77	rendah
7	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	55.97	62.41	64.33	62.2	rendah
8	Aceh	Kab. Aceh Tengah	54.2	58.77	62.19	59.35	rendah
9	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	56.03	60.05	64.72	61.15	rendah
10	Aceh	Kab. Aceh Timur	56.97	61.51	64.54	61.97	rendah
11	Aceh	Kab. Aceh Utara	55.25	60.11	62.25	60.21	rendah
12	Aceh	Kab. Bener Meriah	54.68	59.23	61.34	59.36	rendah
13	Aceh	Kab. Bireuen	54.65	59.63	64.47	60.65	rendah
14	Aceh	Kab. Gayo Lues	51.71	55.18	56.69	55.24	rendah
15	Aceh	Kab. Nagan Raya	53.71	58.72	59.83	58.43	rendah
16	Aceh	Kab. Pidie	59.11	63.66	69.08	64.96	rendah
17	Aceh	Kab. Pidie Jaya	58.67	61.89	65.09	62.6	rendah
18	Aceh	Kab. Simeulue	33.08	35.8	37.44	36.01	sangat rendah
19	Aceh	Kota Banda Aceh	55.89	61.2	65.28	61.91	rendah
20	Aceh	Kota Langsa	54.98	59.24	62.46	59.8	rendah
21	Aceh	Kota Lhokseumawe	57.28	60.94	67.9	62.9	rendah
22	Aceh	Kota Sabang	46.38	49.59	54.99	51.06	rendah
23	Aceh	Kota Subulussalam	31.69	33.71	37.03	34.61	sangat rendah
24	Sumatera Utara	Kab. Asahan	53.41	57.73	60.25	58.03	rendah
25	Sumatera Utara	Kab. Dairi	54.74	60.45	64.33	61.03	rendah
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	54.71	59.4	61.95	59.66	rendah
27	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	53.94	57.85	59.91	58.05	rendah
28	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	54.27	60.24	62.68	60.28	rendah
29	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	53.97	58.56	59.79	58.37	rendah
30	Sumatera Utara	Kab. Langkat	55.16	59.32	61.62	59.57	rendah
31	Sumatera Utara	Kab. Nias	59	65.62	68.04	65.58	sedang
32	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	19.52	21.58	22.63	21.67	sangat rendah
33	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	61.3	68.46	71.01	68.39	sedang
34	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	57.91	64.07	68.19	64.68	rendah
35	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	31.96	34.07	34.98	34.11	sangat rendah
36	Sumatera Utara	Kab. PakPak Bharat	55.17	59.97	63.11	60.42	rendah
37	Sumatera Utara	Kab. Samosir	56.11	59.74	63.79	60.68	rendah
38	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	54.23	58.48	61.65	59.02	rendah
39	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	52.48	57.24	60.19	57.62	rendah
40	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	56.51	60.6	63.87	61.2	rendah
41	Sumatera Utara	Kota Binjai	51.69	56.59	59.9	57.08	rendah
42	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	56.82	61.77	66.13	62.64	rendah
43	Sumatera Utara	Kota Medan	54.46	58.96	62.93	59.74	rendah
44	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	54.06	58.07	62.71	59.16	rendah
45	Sumatera Utara	Kota Sibolga	53.7	57.72	60.37	58.11	rendah
46	Sumatera Utara	Kota Tanjung balai	54.4	58.5	60.97	58.82	rendah
47	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	52.7	56.44	59.88	57.14	rendah
48	Sumatera Utara	Kab. Batu bara	54.99	59.09	61.34	59.33	rendah
49	Sumatera Utara	Kab. Karo	52.29	56.93	61.73	57.98	rendah

50	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	54.58	58.86	62.87	59.69	rendah
51	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	55.42	60.29	61.66	60.11	rendah
52	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	52.9	57.44	61.12	58.11	rendah
53	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	56.84	61.22	64.01	61.61	rendah
54	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	51.05	55.37	59.25	56.13	rendah
55	Sumatera Barat	Kab. Agam	53.98	56.54	63.15	58.52	rendah
56	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	53.77	56.97	60.75	57.87	rendah
57	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	55.05	60.49	63.03	60.64	rendah
58	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	53.21	56.47	62.92	58.29	rendah
59	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	52.55	55.42	60.29	56.74	rendah
60	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	54.72	58.35	60.96	58.78	rendah
61	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	57.26	60.6	66.59	62.26	rendah
62	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	58.21	61.86	66.02	62.85	rendah
63	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	55.19	58.39	64.96	60.27	rendah
64	Sumatera Barat	Kab. Solok	53.8	57.52	65.06	59.66	rendah
65	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	56.22	62.35	64.77	62.36	rendah
66	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	53.98	56.85	64.14	59.03	rendah
67	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	42.08	43.64	47.53	44.81	sangat rendah
68	Sumatera Barat	Kota Padang	55.21	59.24	63.49	60.19	rendah
69	Sumatera Barat	Kota Padang panjang	66.66	69.89	74.11	70.99	sedang
70	Sumatera Barat	Kota Pariaman	51.73	55.23	59.71	56.32	rendah
71	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	54.4	56.02	63.47	58.43	rendah
72	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	53.3	56.75	63.54	58.67	rendah
73	Sumatera Barat	Kota Solok	53.27	57.44	63.79	59.1	rendah
74	Riau	Kab. Bengkalis	54.22	58.29	61.88	59	rendah
75	Riau	Kab. Indragiri Hilir	53.81	58.45	63.45	59.57	rendah
76	Riau	Kab. Indragiri Hulu	51.98	56.61	62.94	58.19	rendah
77	Riau	Kab. Kampar	56.66	61.74	64.94	62.18	rendah
78	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	53.97	57.62	62.23	58.74	rendah
79	Riau	Kab. Kuantan Singingi	53.58	57.51	62.67	58.79	rendah
80	Riau	Kab. Pelalawan	50.76	55.98	59.38	56.45	rendah
81	Riau	Kab. Rokan Hilir	55.8	60.11	65.04	61.26	rendah
82	Riau	Kab. Rokan Hulu	54.29	58.19	61.32	58.77	rendah
83	Riau	Kab. Siak	54.3	58.33	61.83	59.02	rendah
84	Riau	Kota Dumai	53.89	56.74	61.7	58.1	rendah
85	Riau	Kota Pekanbaru	52.48	56.98	61.03	57.79	rendah
86	Jambi	Kab. Batanghari	55.32	57.1	62.74	58.85	rendah
87	Jambi	Kab. Bungo	24.17	26.29	27.7	26.49	sangat rendah
88	Jambi	Kab. Kerinci	55.9	60.17	65.3	61.4	rendah
89	Jambi	Kab. Merangin	53.65	58.38	62.33	59.12	rendah
90	Jambi	Kab. Muaro Jambi	54.57	57.97	61.9	58.9	rendah
91	Jambi	Kab. Sarolangun	54.99	58.47	62	59.24	rendah
92	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	53.82	57.41	62.28	58.64	rendah
93	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	51.46	53.83	57.76	54.9	rendah
94	Jambi	Kab. Tebo	17.68	18.85	20.69	19.34	sangat rendah
95	Jambi	Kota Jambi	51.72	55.93	61.26	57.22	rendah
96	Jambi	Kota Sungai Penuh	54.67	58.87	64.05	60.12	rendah
97	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	56.53	60.86	65.25	61.82	rendah
98	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	55.63	60.76	63.12	60.89	rendah
99	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	57.09	60.81	63.11	61.13	rendah
100	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	57.83	61.71	65.01	62.36	rendah
101	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	55.8	59.62	63.98	60.64	rendah

102	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	53.3	56.76	59.29	57.18	rendah
103	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	56.63	61.01	63.43	61.28	rendah
104	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	57.61	60.74	66	62.18	rendah
105	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	58.68	64.3	66.51	64.32	rendah
106	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	55.31	58.27	62.08	59.22	rendah
107	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.47	61.34	63.09	61.3	rendah
108	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	50.9	55.57	56.66	55.31	rendah
109	Sumatera Selatan	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	55.65	60.85	63.94	61.23	rendah
110	Sumatera Selatan	Kota Lubuk linggau	54.38	58.97	62.86	59.71	rendah
111	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	55.5	59.69	61.38	59.72	rendah
112	Sumatera Selatan	Kota Palembang	55.54	60.54	63.72	60.98	rendah
113	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	58.66	63.38	64.9	63.29	rendah
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	54.09	59.45	61.84	59.56	rendah
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	54.44	58.6	61.49	59.05	rendah
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	55.44	58.45	62.28	59.4	rendah
117	Bengkulu	Kab. Kaur	58.53	63.11	65.79	63.44	rendah
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	52.23	55.85	59.21	56.54	rendah
119	Bengkulu	Kab. Lebong	52.7	55.82	58.5	56.34	rendah
120	Bengkulu	Kab. Muko Muko	21.66	23.15	24.8	23.53	sangat rendah
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	50.35	55.61	58.93	56.04	rendah
122	Bengkulu	Kab. Seluma	55.73	61.46	63.54	61.41	rendah
123	Bengkulu	Kota Bengkulu	54.05	58.25	62.26	59.09	rendah
124	Lampung	Kab. Lampung Barat	55.39	59.31	61.4	59.52	rendah
125	Lampung	Kab. Lampung Selatan	53.07	57.73	60.82	58.18	rendah
126	Lampung	Kab. Lampung Tengah	53.14	56.82	58.69	56.98	rendah
127	Lampung	Kab. Lampung Timur	53.27	58.56	61.17	58.75	rendah
128	Lampung	Kab. Lampung Utara	53.42	58.46	62.67	59.24	rendah
129	Lampung	Kab. Mesuji	54.58	59.05	61.57	59.33	rendah
130	Lampung	Kab. Pesawaran	52.57	56.84	60.15	57.42	rendah
131	Lampung	Kab. Pringsewu	54.68	58.39	62.81	59.45	rendah
132	Lampung	Kab. Tanggamus	54.32	58.64	61.74	59.15	rendah
133	Lampung	Kab. Tulang Bawang	54.61	58.05	60.87	58.58	rendah
134	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	53.55	57.53	60.02	57.86	rendah
135	Lampung	Kab. Way Kanan	57.37	61.57	63.85	61.82	rendah
136	Lampung	Kota Bandar Lampung	52.75	56.34	60.58	57.34	rendah
137	Lampung	Kota Metro	52.1	55.02	59.94	56.35	rendah
138	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	52.63	57.05	60.04	57.5	rendah
139	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	54.34	57.6	61.31	58.47	rendah
140	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	55.61	59.93	64.11	60.81	rendah
141	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	52.37	56.49	59.03	56.82	rendah
142	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	52.55	54.87	60.12	56.41	rendah
143	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	53.29	56.13	60.18	57.18	rendah
144	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	52.82	55.27	60.3	56.71	rendah
145	Kep. Riau	Kab. Bintan	50.97	55.58	58.74	56.05	rendah
146	Kep. Riau	Kab. Karimun	53.39	58.82	62.74	59.45	rendah
147	Kep. Riau	Kab. Kepulauan Anambas	54.74	59.87	64.86	60.92	rendah
148	Kep. Riau	Kab. Lingga	53.25	57.28	61.86	58.34	rendah
149	Kep. Riau	Kab. Natuna	53.67	58.14	62.06	58.91	rendah
150	Kep. Riau	Kota Batam	56.09	59.25	65.77	61.13	rendah
151	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	53.63	57.14	59.95	57.66	rendah
152	Dki Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	56.67	60.83	64.3	61.49	rendah
153	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	49.89	52.56	57.14	53.8	rendah

154	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	rendah
155	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	rendah
156	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	rendah
157	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	rendah
158	Jawa Barat	Kab. Bandung	53.37	57.05	61.68	58.18	rendah
159	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	54.66	58.21	63.8	59.69	rendah
160	Jawa Barat	Kab. Bekasi	53.13	57.65	62.41	58.7	rendah
161	Jawa Barat	Kab. Bogor	53.49	57.67	65.54	59.86	rendah
162	Jawa Barat	Kab. Ciamis	55.52	58.95	63.15	59.97	rendah
163	Jawa Barat	Kab. Cianjur	54.81	58.73	63.22	59.78	rendah
164	Jawa Barat	Kab. Cirebon	52	57.37	61.63	58.12	rendah
165	Jawa Barat	Kab. Garut	53.1	56.99	62.18	58.28	rendah
166	Jawa Barat	Kab. Indramayu	55.5	59.87	65.42	61.23	rendah
167	Jawa Barat	Kab. Karawang	53.49	58.25	62.62	59.13	rendah
168	Jawa Barat	Kab. Kuningan	54.18	57.71	64.57	59.64	rendah
169	Jawa Barat	Kab. Majalengka	52.1	56.63	62.01	57.89	rendah
170	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	55.18	60.63	64.09	61.1	rendah
171	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	53.81	56.82	64.28	59.03	rendah
172	Jawa Barat	Kab. Subang	57.26	61.69	68.89	63.62	rendah
173	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	56.39	61.56	68.83	63.41	rendah
174	Jawa Barat	Kab. Sumedang	56.18	60.5	64.88	61.46	rendah
175	Jawa Barat	Kota Bandung	54.44	56.75	64.76	59.26	rendah
176	Jawa Barat	Kota Banjar	52.32	56.1	60.57	57.15	rendah
177	Jawa Barat	Kota Bekasi	49.74	52.11	60.2	54.62	rendah
178	Jawa Barat	Kota Bogor	55.75	58.87	66.72	61.21	rendah
179	Jawa Barat	Kota Cirebon	52.54	56.52	62.81	58.18	rendah
180	Jawa Barat	Kota Depok	52.44	55.48	61.71	57.25	rendah
181	Jawa Barat	Kota Sukabumi	55.2	58.76	65.76	60.74	rendah
182	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	58.19	61.7	67.73	63.36	rendah
183	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	50.62	54.37	58.05	55.15	rendah
184	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	50.57	54.87	58.43	55.53	rendah
185	Jawa Tengah	Kab. Batang	52.35	54.98	62.29	57.19	rendah
186	Jawa Tengah	Kab. Blora	54.33	58.71	64.74	60.23	rendah
187	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	50.53	54.47	58.16	55.22	rendah
188	Jawa Tengah	Kab. Brebes	53.9	57.52	63.04	58.97	rendah
189	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	54.27	57.78	62.61	59.01	rendah
190	Jawa Tengah	Kab. Demak	54.34	58.15	61.72	58.89	rendah
191	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	51.07	56.35	58.66	56.43	rendah
192	Jawa Tengah	Kab. Jepara	52.72	56.61	62.04	57.99	rendah
193	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	52.39	56.08	61.41	57.45	rendah
194	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	53.55	57.39	63.81	59.12	rendah
195	Jawa Tengah	Kab. Kendal	58.18	62.45	68.51	64.01	rendah
196	Jawa Tengah	Kab. Klaten	53.84	56.46	63.26	58.5	rendah
197	Jawa Tengah	Kab. Kudus	51.92	56.19	61.85	57.59	rendah
198	Jawa Tengah	Kab. Magelang	51.18	55.32	59.04	56.06	rendah
199	Jawa Tengah	Kab. Pati	49.67	54.27	57.42	54.73	rendah
200	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	49.54	51.72	56.3	53.03	rendah
201	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	56.72	60.63	65.05	61.67	rendah
202	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	51.89	55.06	60.05	56.38	rendah
203	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	51.95	55.77	60.29	56.83	rendah
204	Jawa Tengah	Kab. Rembang	50.6	56.16	60.04	56.74	rendah
205	Jawa Tengah	Kab. Semarang	48.72	52.11	56.28	53.1	rendah

206	Jawa Tengah	Kab. Sragen	52.34	55.69	61.15	57.15	rendah
207	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	52.42	56.52	63.57	58.43	rendah
208	Jawa Tengah	Kab. Tegal	52.03	55.2	60.73	56.71	rendah
209	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	53.1	56.01	61.7	57.62	rendah
210	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	52.05	55.23	60.21	56.55	rendah
211	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	52.68	56.06	60.89	57.3	rendah
212	Jawa Tengah	Kota Magelang	54.2	56.98	62.24	58.46	rendah
213	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	52.48	54.84	62.73	57.29	rendah
214	Jawa Tengah	Kota Salatiga	49.19	52.29	58.49	54.04	rendah
215	Jawa Tengah	Kota Semarang	53.89	56.63	63.07	58.53	rendah
216	Jawa Tengah	Kota Surakarta	51.58	55.03	61.88	56.96	rendah
217	Jawa Tengah	Kota Tegal	52.41	56.14	63.17	58.09	rendah
218	Di Yogyakarta	Kab. Bantul	50.78	55.06	59.23	55.93	rendah
219	Di Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	50.41	53.3	57.97	54.54	rendah
220	Di Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	51.92	55.42	61.55	57.09	rendah
221	Di Yogyakarta	Kab. Sleman	50.06	53	60.05	55.07	rendah
222	Di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	50.26	53.17	59.05	54.83	rendah
223	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	54.98	60.02	64.64	60.96	rendah
224	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	56.15	61.48	67.54	62.88	rendah
225	Jawa Timur	Kab. Blitar	50.2	55.09	58	55.43	rendah
226	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	53.29	58.38	62.5	59.12	rendah
227	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	51.5	55.81	59.38	56.47	rendah
228	Jawa Timur	Kab. Gresik	61.49	65.84	70.86	67.04	sedang
229	Jawa Timur	Kab. Jember	52.79	57.27	61.46	58.13	rendah
230	Jawa Timur	Kab. Jombang	53.28	56.86	63.47	58.69	rendah
231	Jawa Timur	Kab. Kediri	51.8	55.56	61.17	57.01	rendah
232	Jawa Timur	Kab. Lamongan	54.88	59.73	66.69	61.51	rendah
233	Jawa Timur	Kab. Lumajang	52.75	57.51	61.72	58.33	rendah
234	Jawa Timur	Kab. Madiun	53.92	57.82	63.06	59.13	rendah
235	Jawa Timur	Kab. Magetan	55.63	60.48	65.36	61.54	rendah
236	Jawa Timur	Kab. Malang	51.75	56.54	60.93	57.42	rendah
237	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	59.34	62.37	67.77	63.89	rendah
238	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	53.67	57.24	60.61	57.94	rendah
239	Jawa Timur	Kab. Ngawi	51.89	55.31	59.8	56.42	rendah
240	Jawa Timur	Kab. Pacitan	51.31	55.18	59.28	56.09	rendah
241	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	50.46	55.49	58.84	55.96	rendah
242	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	52.36	56.95	59.18	57.11	rendah
243	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	50.54	53.03	61	55.49	rendah
244	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	58.27	62.61	66.54	63.42	rendah
245	Jawa Timur	Kab. Sampang	56.46	60.41	64.1	61.18	rendah
246	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	53.4	56.71	61.73	58.03	rendah
247	Jawa Timur	Kab. Situbondo	54.95	58.58	63.06	59.67	rendah
248	Jawa Timur	Kab. Sumenep	51.8	55.59	60.08	56.65	rendah
249	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	51.98	56.7	60.94	57.54	rendah
250	Jawa Timur	Kab. Tuban	54.93	58.63	64.23	60.1	rendah
251	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	51.94	56.61	60.44	57.31	rendah
252	Jawa Timur	Kota Batu	51.03	55.3	60.99	56.71	rendah
253	Jawa Timur	Kota Blitar	46.96	52.59	60.25	54.47	rendah
254	Jawa Timur	Kota Kediri	51.25	54.89	59.39	55.97	rendah
255	Jawa Timur	Kota Malang	53.81	58.55	61.9	59.08	rendah
256	Jawa Timur	Kota Mojokerto	60.7	62.71	63.66	62.82	rendah
257	Jawa Timur	Kota Pasuruan	53.47	57.13	61.59	58.2	rendah

258	Jawa Timur	Kota Probolinggo	55.46	57.58	62.5	59.04	rendah
259	Jawa Timur	Kota Surabaya	70.72	79.57	82.47	79.42	sedang
260	Jawa Timur	Kota Madiun	58.98	62.56	70.49	64.88	rendah
261	Banten	Kab. Lebak	47.58	51.94	55.6	52.63	rendah
262	Banten	Kab. Pandeglang	51.91	57.13	61.14	57.82	rendah
263	Banten	Kab. Serang	48.26	51.76	58.75	53.72	rendah
264	Banten	Kab. Tangerang	53.94	57.3	61.87	58.46	rendah
265	Banten	Kota Cilegon	54.21	57.41	63.38	59.08	rendah
266	Banten	Kota Serang	30.97	33.3	37.98	34.62	sangat rendah
267	Banten	Kota Tangerang	55.7	59.41	64.13	60.57	rendah
268	Banten	Kota Tangerang Selatan	51.47	55.18	59.23	56.09	rendah
269	Bali	Kab. Badung	61.34	64.38	66.58	64.78	rendah
270	Bali	Kab. Buleleng	5.86	6.17	6.49	6.24	sangat rendah
271	Bali	Kab. Gianyar	54.46	58.17	62.02	59.02	rendah
272	Bali	Kab. Karangasem	53.65	58.14	58.65	57.71	rendah
273	Bali	Kab. Klungkung	54.07	57.19	60.43	57.92	rendah
274	Bali	Kab. Tabanan	54.6	57.74	60.11	58.16	rendah
275	Bali	Kota Denpasar	54.93	58.77	62.72	59.65	rendah
276	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	59.48	63.76	66.6	64.2	rendah
277	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	56.69	61.3	65.13	62.03	rendah
278	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	54.28	57.05	63.05	58.79	rendah
279	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	54.54	58.39	63.75	59.75	rendah
280	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	53.96	58.56	64.46	60	rendah
281	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	52.92	56.36	59.14	56.87	rendah
282	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	54.18	58.38	64.03	59.8	rendah
283	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	57.78	62.03	67.57	63.41	rendah
284	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	63.41	68.24	72.62	69.15	sedang
285	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	53.96	57.47	62.87	58.89	rendah
286	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	56.6	61.29	64.2	61.68	rendah
287	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	54.64	60.81	64.43	61.23	rendah
288	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	56.4	62.92	67.37	63.59	rendah
289	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	53.25	58.57	63.38	59.52	rendah
290	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	57.27	63.06	65.21	63.03	rendah
291	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	56.87	61.47	65.71	62.34	rendah
292	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	58.12	64.76	68.1	65.03	sedang
293	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	55.14	62.02	67.05	62.84	rendah
294	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	55.6	61.67	66.41	62.5	rendah
295	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	57.01	64.98	69.88	65.6	sedang
296	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	54.84	59.63	62.61	60.03	rendah
297	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	55.23	60	64.8	61.04	rendah
298	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	56.55	62.21	66.15	62.82	rendah
299	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	55.83	61.63	63.78	61.6	rendah
300	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	51.79	57.66	62.19	58.43	rendah
301	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	56.83	62.15	66.95	63.12	rendah
302	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	57.35	62.12	65.29	62.6	rendah
303	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	55.63	60.6	65.44	61.62	rendah
304	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	57.84	63.35	66.88	63.85	rendah
305	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	54.64	60.79	64.17	61.13	rendah
306	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	58.06	63.01	66.26	63.49	rendah
307	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	53.93	57.96	63.9	59.5	rendah
308	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	53.14	56.9	62.67	58.41	rendah
309	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	54.37	60.12	63.6	60.55	rendah

310	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51.86	56.35	58.06	56.34	rendah
311	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	66.36	69.36	70.64	69.46	sedang
312	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	52.5	58.04	63.34	59.13	rendah
313	Kalimantan Barat	Kab. Landak	54.18	59.16	62.38	59.61	rendah
314	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	52.03	57.98	59.17	57.58	rendah
315	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	54.88	58.17	63.33	59.54	rendah
316	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	50.98	55.89	60.96	56.99	rendah
317	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	64.27	67.79	68.7	67.68	sedang
318	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.69	57.09	60.34	57.63	rendah
319	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	50.65	56.37	60.58	57.05	rendah
320	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	57.69	60.27	66.45	62.11	rendah
321	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	55.03	58.5	64.7	60.22	rendah
322	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	3.89	4.27	4.7	4.37	sangat rendah
323	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	52.44	56.12	61.03	57.34	rendah
324	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	36.6	38.81	41.52	39.47	sangat rendah
325	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	54.98	59.34	62.95	60.02	rendah
326	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	53.83	57.9	62.41	58.93	rendah
327	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	53.27	56.88	63.8	58.82	rendah
328	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	52.35	57.61	60.43	57.87	rendah
329	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	53.07	57.77	61.27	58.36	rendah
330	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	55.1	60.96	64.98	61.58	rendah
331	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	50.18	53.2	57.55	54.32	rendah
332	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	53.91	58.33	61.03	58.68	rendah
333	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	53.87	58.92	62.17	59.37	rendah
334	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	17	18.27	19.62	18.57	sangat rendah
335	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	52.79	57	59.46	57.29	rendah
336	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	51.48	56.07	61.03	57.18	rendah
337	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	50.62	55.14	58.71	55.77	rendah
338	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	59.54	64.74	72.15	66.64	sedang
339	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	53.39	56.03	60.9	57.39	rendah
340	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	52.13	56.45	60.73	57.36	rendah
341	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	53.98	57.66	60.76	58.26	rendah
342	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	51.72	55.94	59.72	56.69	rendah
343	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	53.96	57.13	61.27	58.16	rendah
344	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	50.26	55.2	60.28	56.29	rendah
345	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	51.46	54.59	58.67	55.59	rendah
346	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	49.64	53.48	59.11	54.92	rendah
347	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	50.87	54.62	61.46	56.5	rendah
348	Kalimantan Timur	Kab. Berau	51.76	56	62.37	57.65	rendah
349	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	49.4	54.14	59.97	55.53	rendah
350	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	53.19	55.77	60.3	57.02	rendah
351	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	52.81	56.76	61.13	57.76	rendah
352	Kalimantan Timur	Kab. Paser	53.11	56.2	63.01	58.18	rendah
353	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	51.37	54.07	60.28	55.88	rendah
354	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	53.51	56.24	64.45	58.76	rendah
355	Kalimantan Timur	Kota Bontang	54.3	58.69	65.47	60.47	rendah
356	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	52.46	56.61	63.76	58.55	rendah
357	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	52.41	56.84	60.96	57.68	rendah
358	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	55.54	60.21	64.83	61.2	rendah
359	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	53.74	58.15	62.06	58.92	rendah
360	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	53.86	56.18	61.75	57.84	rendah
361	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	51.93	56.19	62.93	57.97	rendah

362	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	53.94	58.14	60.26	58.32	rendah
363	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	55.12	59.07	62.33	59.68	rendah
364	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	53.57	57.48	61.65	58.41	rendah
365	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	55.87	59.92	64.41	60.95	rendah
366	Sulawesi Utara	Kota Bitung	55.53	58.44	63.37	59.79	rendah
367	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	53.84	58	61.07	58.52	rendah
368	Sulawesi Utara	Kota Manado	53.17	57.69	63.02	58.94	rendah
369	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	51.02	54.59	58.35	55.42	rendah
370	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.98	58.47	62.16	59.3	rendah
371	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	53.57	57.41	60.05	57.82	rendah
372	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	54.53	58.8	63.61	59.91	rendah
373	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	55.27	61.12	64.77	61.6	rendah
374	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	53.7	56.84	62.57	58.43	rendah
375	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	55.5	59.6	64.68	60.83	rendah
376	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	53.43	56.24	61.39	57.67	rendah
377	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	54.85	59.19	64.72	60.55	rendah
378	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	54.54	58.81	64.51	60.23	rendah
379	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	55.98	60.37	64.08	61.09	rendah
380	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	56.15	61.37	64.13	61.63	rendah
381	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	53.73	58.27	63.15	59.36	rendah
382	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	52.67	57.89	60	57.92	rendah
383	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	52.86	57.7	61.53	58.38	rendah
384	Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	54.34	58.96	63.22	59.83	rendah
385	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	56.06	60.73	63.22	60.98	rendah
386	Sulawesi Tengah	Kota Palu	54.08	58.68	63.77	59.84	rendah
387	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	52.47	58.13	61.26	58.45	rendah
388	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	50.1	54.6	56.6	54.68	rendah
389	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	55.77	60.52	63.07	60.78	rendah
390	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	55.91	58.26	62.4	59.41	rendah
391	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	54.37	58.35	63.18	59.51	rendah
392	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	54.81	58.55	63.17	59.67	rendah
393	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	56.55	60.72	64.92	61.63	rendah
394	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	56.57	60.4	66.1	61.89	rendah
395	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	54.66	59.05	61.71	59.39	rendah
396	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	57.38	61.21	65.51	62.22	rendah
397	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	52.19	55.25	59.25	56.24	rendah
398	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	55.69	59.47	63.59	60.41	rendah
399	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	55.19	59.04	65.27	60.71	rendah
400	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	54.73	59.84	64.12	60.65	rendah
401	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	56.54	59.02	65.72	61.05	rendah
402	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	55.77	60.17	65.68	61.51	rendah
403	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	53.62	57.47	60.64	58.06	rendah
404	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	55.61	60.23	66.99	61.98	rendah
405	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	53.86	58.57	60.92	58.76	rendah
406	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	58.66	61.97	68.34	63.78	rendah
407	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	53.48	58.21	61.6	58.76	rendah
408	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	51.76	56.62	60	57.14	rendah
409	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	54.96	59.9	64.25	60.76	rendah
410	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	53.48	57.98	62.75	59.04	rendah
411	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	53.26	57.15	61.64	58.2	rendah
412	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	52.91	56.24	62.51	57.99	rendah
413	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	55.41	60.6	63.64	60.96	rendah

414	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	56.64	61.82	66.35	62.71	rendah
415	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	57.83	62.6	68.13	63.9	rendah
416	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	33.61	36.75	39.35	37.24	sangat rendah
417	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	52.71	56.51	58.85	56.82	rendah
418	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	53	57.29	59.35	57.43	rendah
419	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	54.17	59.05	62.55	59.62	rendah
420	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	56.74	61.74	66.11	62.6	rendah
421	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	56.23	59.67	63.18	60.45	rendah
422	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	54.02	57.63	61.15	58.38	rendah
423	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	9.98	10.73	11.22	10.8	sangat rendah
424	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	57.81	62.66	67.39	63.67	rendah
425	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	50.3	54.77	58.65	55.51	rendah
426	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	21.84	23.5	25.9	24.12	sangat rendah
427	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	57.25	61.4	68	63.17	rendah
428	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	42.59	46.72	51.16	47.72	sangat rendah
429	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	55.89	61.6	66.84	62.66	rendah
430	Gorontalo	Kab. Boalemo	53.8	58.64	61.65	59.04	rendah
431	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	54.74	59.15	65.58	60.81	rendah
432	Gorontalo	Kab. Gorontalo	54.7	58.68	61.05	58.98	rendah
433	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	53.47	58.31	62.12	58.99	rendah
434	Gorontalo	Kab. Pohuwato	53.85	57.96	61.83	58.76	rendah
435	Gorontalo	Kota Gorontalo	54.33	57.38	62.08	58.62	rendah
436	Sulawesi Barat	Kab. Majene	54.6	58.7	63.81	59.94	rendah
437	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	6.61	7.41	8.06	7.52	sangat rendah
438	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	25.86	28.4	30.64	28.84	sangat rendah
439	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	10.1	10.27	11.63	10.73	sangat rendah
440	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	40.88	44.31	46.36	44.56	sangat rendah
441	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	54.9	58.8	62.23	59.48	rendah
442	Maluku	Kab. Buru	61.3	66.58	70.29	67.19	sedang
443	Maluku	Kab. Buru Selatan	17.75	19.25	20.77	19.58	sangat rendah
444	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	55.79	61.76	63.18	61.45	rendah
445	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	7.07	7.78	8.37	7.89	sangat rendah
446	Maluku	Kab. Maluku Tengah	53.5	58.47	62.04	59.05	rendah
447	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	57.04	62.69	66.37	63.22	rendah
448	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.61	4.89	5.14	4.94	sangat rendah
449	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	30.5	32.96	34.25	33.08	sangat rendah
450	Maluku	Kota Ambon	53.5	59.65	62.36	59.75	rendah
451	Maluku	Kota Tual	56.53	61.81	66.23	62.65	rendah
452	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	56.13	60.34	63.97	61.05	rendah
453	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	56.37	61.57	64.2	61.79	rendah
454	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	55.28	60.05	62.1	60.13	rendah
455	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	54.64	60.21	63.08	60.46	rendah
456	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	55.91	60.32	62.15	60.37	rendah
457	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	54.84	59.23	62.09	59.64	rendah
458	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	56.49	60.96	64.55	61.62	rendah
459	Maluku Utara	Kota Ternate	54.59	59.01	63.49	59.99	rendah
460	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	54.91	58.92	62.49	59.63	rendah
461	Papua	Kab. Jayapura	1.22	1.13	1.07	1.12	sangat rendah
462	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0.27	0.32	0.29	0.3	sangat rendah
463	Papua	Kab. Sarmi	3.66	3.92	4.28	4.01	sangat rendah
464	Papua	Kab. Supiori	50.94	53.09	61.25	55.66	rendah
465	Papua	Kota Jayapura	1.01	1.21	1.12	1.15	sangat rendah

466	Papua	Kab. Waropen	0.14	0.15	0.12	0.14	sangat rendah
467	Papua	Kab. Keerom	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
468	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	43.62	47.14	51.15	48.07	sangat rendah
469	Papua Barat Daya	Kota Sorong	36.67	40.13	44.83	41.3	sangat rendah
470	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0.32	0.34	0.36	0.34	sangat rendah
471	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1.01	1.33	1.56	1.36	sangat rendah
472	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0.11	0.1	0.12	0.11	sangat rendah
473	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
474	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0
475	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	0	0	0	0	0
476	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0	0	0	0	0
477	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0.21	0.25	0.25	0.25	sangat rendah
478	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0	0	0	0	0
479	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1.08	1.06	1.19	1.11	sangat rendah
480	Papua Barat	Kab. Fakfak	53.7	58.78	60.99	58.86	rendah
481	Papua Barat	Kab. Manokwari	49.51	53.93	60.33	55.57	rendah
482	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	23.36	25.37	27.27	25.77	sangat rendah
483	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	49.36	56.21	52.57	53.98	rendah
484	Papua Barat	Kab. Kaimana	54.06	59.42	61.3	59.35	rendah
485	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	19.68	21.19	22.26	21.36	sangat rendah
486	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	12.12	13.47	13.56	13.32	sangat rendah
487	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
488	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0.14	0.16	0.19	0.17	sangat rendah
489	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0.27	0.3	0.24	0.27	sangat rendah
490	Papua Tengah	Kab. Mimika	49.25	54.26	59.53	55.41	rendah
491	Papua Tengah	Kab. Paniai	0.16	0.15	0.11	0.14	sangat rendah
492	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0
493	Papua Selatan	Kab. Merauke	8.41	9.42	9.65	9.37	sangat rendah
494	Papua Selatan	Kab. Mappi	3.25	3.6	3.71	3.59	sangat rendah
495	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0.14	0.19	0.25	0.21	sangat rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90